

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : TAHUN 2022
TANGGAL : 2022
TENTANG : RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023 - 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan yang disusun dan ditetapkan setiap lima tahun, sebagai langkah awal dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen Renstra wajib disusun dan ditetapkan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mampu menjawab tuntutan internal dan eksternal yang berada dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan perumusan renstra yang jelas dan sinergis oleh OPD, maka dapat mempertajam serta menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi serta kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo 2023-2026.

Penyusunan dokumen Renstra secara objektif harus berlandaskan isu strategis dan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis daerah. Isu strategis yang terhimpun harus dilengkapi dengan kegiatan yang bersifat indikatif kemudian diterjemahkan dalam bentuk strategi kebijakan yang terarah, efektif dan berkesinambungan. Hal ini dimaksudkan agar visi misi Pemerintah Daerah dapat tercapai.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026, didasarkan pada ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASIS/EN	SEKDA
			

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022;
 10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016);
 11. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, maka Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan maksud:

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan;
2. Sebagai dasar dan tolak ukur penilaian kinerja;
3. Tersedianya program dan prioritas kegiatan yang dapat dijadikan pedoman oleh Biro-Biro pada Sekretariat Daerah dalam mewujudkan optimalisasi kinerja;
4. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 4 (empat) tahun kedepan;
5. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
6. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Biro-Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.

1.3.2 Tujuan

Berdasarkan maksud diatas maka tujuan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 adalah:

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program prioritas perangkat daerah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 dan mendukung Visi Misi RPJPD Provinsi Gorontalo 2007-2025;

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA
			

- 2. Menetapkan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Perangkat Daerah dan dokumen perencanaan penganggaran;
- 3. Menetapkan tolak ukur penilaian keberhadilan kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam upaya mewujudkan sasaran pembangunan daerah 2023-2026;
- 4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 disusun dengan tata urutan penulisan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 111 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang latar belakang penyusunan, pengertian rencana strategis, maksud dan tujuan, landasan yuridis baik idiil, konstitusional maupun operasional. Dalam Bab ini juga disajikan tata urutan penulisan yang merupakan alur berfikir dari dokumen rencana strategis.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO, Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo, identifikasi isu-isu strategis, telaahan visi, misi, dan program RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026 serta telaahan perencanaan Kementerian/Lembaga Negara Terkait.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, berisi tentang Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo dalam Periode Renstra 2023-2026 berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, berisi tentang strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan oleh Sekretariat Daerah selama Periode Renstra untuk mencapai Tujuan dan Sasaran.

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA
			

- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**, berisi tentang rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif yang didalamnya terurai program, kegiatan, serta target yang akan dicapai dalam periode Renstra.
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**, berisi tentang indikator kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam periode Resntra sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.
- BAB VIII PENUTUP**, berisi tentang kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026.

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI GORONTALO

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo

2.1.1 Tugas Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah, pada Bagian Kesatu disebutkan bahwa Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur dengan tugas membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

2.1.2 Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi:





1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Instansi Daerah; dan
5. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo

Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo dipimpin oleh Sekretaris dengan jenjang eselonering I.b, membawahi 3 (tiga) asisten dengan tingkat eselonering II.a, masing-masing asisten membawahi Biro-Biro dengan tingkat eselonering II.b, setiap Biro membawahi Bagian dengan tingkat eselonering III.a, masing-masing bagian membawahi sub bagian dengan tingkat eselonering IV.a, selain itu terdapat pula Kelompok Pejabat Fungsional yang dibawah langsung oleh Kepala Biro. Secara rinci, susunan organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

Sekretaris Daerah selaku Kepala Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo membawahi:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - 1.1. Susunan Organisasi Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
 - a. Kepala Biro;
 - b. Bagian Otonomi Daerah;
 - c. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - d. Koordinator dan Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 1.2. Susunan Organisasi Biro Hukum terdiri dari:
 - a. Kepala Biro;
 - b. Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota;
 - c. Bagian Bantuan Hukum, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha.
 - d. Koordinator dan Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional.

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA
			

- 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
 - 2.1 Susunan Organisasi Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari:
 - a. Kepala Biro;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha Biro; dan
 - c. Koordinator dan Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 2.2 Susunan Biro Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari:
 - a. Kepala Biro;
 - b. Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Eletronik, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Pengelolaan Informasi Barang dan Jasa serta Tata Usaha.
 - d. Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - e. Koordinator dan Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional.
- 3. Asisten Administrasi Umum
 - 3.1 Susunan Organisasi Biro Organisasi terdiri dari;
 - a. Kepala Biro
 - b. Bagian Kelembagaan dan Anjab;
 - c. Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja;
 - d. Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - e. Koordinator dan Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 3.2 Susunan Organisasi Biro Umum terdiri dari:
 - a. Kepala Biro;
 - b. Bagian Rumah Tangga;
 - c. Bagian Administrasi Keuangan dan Aset;
 - d. Bagian Administrasi Pimpinan, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli;
 - e. Koordinator dan Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional.

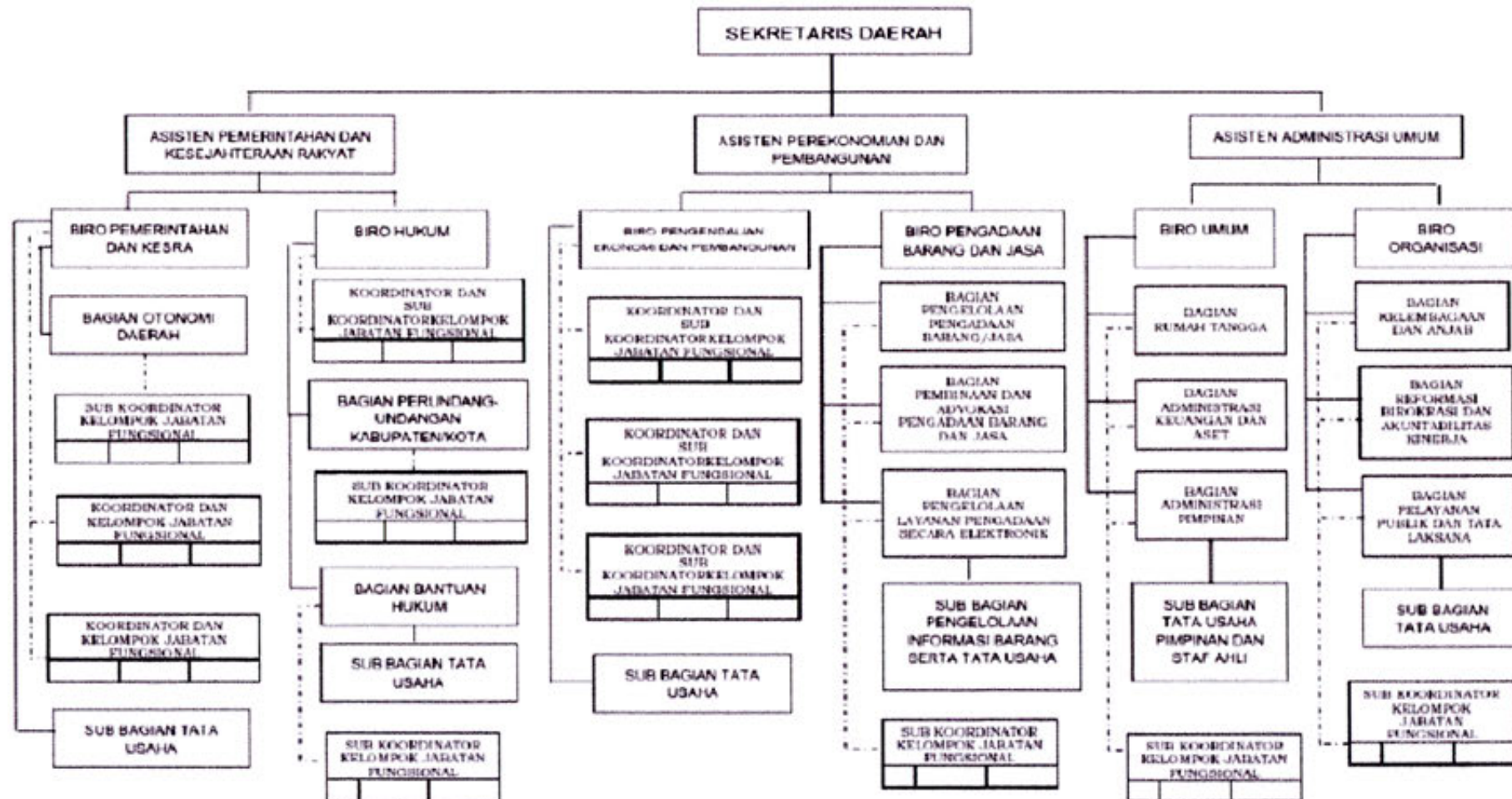
Selain membawahi 3 (tiga) Asisten dan 6 (enam) Biro, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo secara Administratif mengkoordinasikan 3 (tiga) Staf Ahli Gubernur yaitu:

- a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan; dan
- c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM.

Adapun Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah dapat digambarkan pada Gambar 2.1 berikut :

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA
			

GAMBAR 2.1
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH



KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Pendukung Aparatur Perangkat Daerah

Potensi Sumber Daya Aparatur merupakan kondisi riil yang dimiliki oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam kurun waktu tertentu. Kondisi tersebut terkait dengan Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dimulai dari jumlah pegawai yang dimiliki untuk dipetakan berdasarkan jenjang kepangkatan, tingkat pendidikan, jenis kelamin dan termasuk penyebaran ASN pada masing-masing biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo, baik yang memangku jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum yang ditampilkan dalam tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1.
Komposisi Jabatan Struktural Aparatur Sipil Negara Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan Eselon

No	Uraian	Eselon				JFT	JFU	Jumlah
		I	II	III	IV			
1	Sekretaris Daerah	1	-	-	-	-	-	1
2	Asisten	-	3	-	-	-	-	3
3	Staf Ahli	-	3	-	-	-	-	3
4	Biro Pemerintahan dan Kesra	-	1	1	1	9	21	33
5	Biro Hukum	-	1	2	1	9	12	25
6	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	-	1	-	1	11	12	25
7	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	-	1	3	1	15	10	30
8	Biro Organisasi	-	1	3	1	8	13	26
9	Biro Umum	-	1	3	1	8	60	73
Total		1	12	12	6	60	128	219

Sumber Data: Subbag TU Biro-Biro periode 2022

Pada tabel diatas dijelaskan jumlah ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo. Selanjutnya untuk penyebaran pegawai disesuaikan dengan kebutuhan biro yang ada, namun demikian kebutuhan akan pegawai baik secara kuantitas dan kualitas masih perlu ditingkatkan sesuai dengan bidang tugas baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional.

Adapun jumlah ASN berdasarkan Golongan secara rinci sebagaimana tabel 2.2. di bawah ini:

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA
			

Tabel 2.2.
Komposisi Aparatur Sipil Negara Sekretariat Daerah
Provinsi Gorontalo Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Sekretaris Daerah	1	-	-	-	1
2	Asisten	3	-	-	-	3
3	Staf Ahli	3	-	-	-	3
4	Biro Pemerintahan dan Kesra	6	21	6	-	33
5	Biro Hukum	4	13	8	-	25
6	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	3	22	-	-	25
7	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	4	24	2	-	30
8	Biro Organisasi	6	15	5	-	26
9	Biro Umum	8	51	13	1	73
Total		38	146	34	1	219

Sumber Data: Subbag TU Biro-Biro periode 2022

Berdasarkan kualifikasi tingkat Pendidikan ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3.
Komposisi Aparatur Sipil Negara Sekretariat Daerah Gorontalo Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

No	Uraian	Pendidikan							Jumlah
		S3	S2	S1	Diploma	SLTA	SLTP	SD	
1	Sekretaris Daerah	1	-	-	-	-	-	-	1
2	Asisten	-	3	-	-	-	-	-	3
3	Staf Ahli	1	2	-	-	-	-	-	3
4	Biro Pemerintahan dan Kesra	-	6	20	7	-	-	-	33
5	Biro Hukum	-	3	13	-	9	-	-	25
6	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	-	5	13	2	5	-	-	25
7	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	1	5	21	-	3	-	-	30
8	Biro Organisasi	-	4	15	3	4	-	-	26
9	Biro Umum	-	7	26	13	25	2	-	73
Total		3	35	108	25	46	2	-	219

Sumber Data: Subbag TU Biro-Biro periode 2022

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA
			

Berdasarkan tabel 2.3 di atas, tingkat pendidikan Aparatur Sipil Negara Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo didominasi tingkat pendidikan SLTA sebanyak 108 orang, Strata 3 sebanyak 3 orang atau, Strata 2 sebanyak 35 orang, tingkat Pendidikan Diploma sebanyak 25 orang, tingkat SLTA sebanyak 46 orang, tingkat SLTP sebanyak 2 orang. Sedangkan tingkat pendidikan paling minim, yaitu tingkat pendidikan SLTP sebanyak 2 orang.

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo

Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo sebagai fasilitator dan advisor dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah Provinsi Gorontalo yang amanah, berupaya untuk melaksanakan tugas dan fungsi membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas/Badan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga-lembaga lainnya di daerah. Guna melihat Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo dapat dilihat melalui capaian target kinerja pada tahun-tahun sebelumnya yakni tahun 2017-2021 dengan menggunakan berbagai indikator di antaranya adalah Indikator Kinerja Kunci (IKK) atau indikator-indikator lainnya, serta melihat realisasi anggaran yang telah digunakan di tahun-tahun sebelumnya. Adapun tabel capaian kinerja dan tabel realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini.

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA
			

TABEL 2.4 (T.C-23)

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO





NO.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS & FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TA RG ET NSP K	TA RG ET IK K	TARGET INDIKAT OR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN PADA TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE (%)				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Sekretariat Daerah																			
1	Persentase Pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
2	Persentase Pelayanan Pemerintahan Desa/Kelurahan yang berkualitas				100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	-	100%	100	100	100	100	-
3	Persentase Pemasangan Pilar Batas Daerah yang Terpasang, Koordinasi Pelaksanaan PATEN, Dekonsentrasi dan TP				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
4	Persentase Pelayanan Kengamanan, Adat dan Budaya				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
5	Persentase Peningkatan Layanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
6	Tersusunnya Produk Hukum Daerah				10 Perda	10 Perda	10 Perda	2 Rancangan Produk Hukum	2 Rancangan Produk Hukum	8 Perda	10 Perda	10 Perda	2 Rancangan Produk Hukum	3 Rancangan Produk Hukum	80	100	100	100	100
					10 Pergub	300 Pergub/ SK	300 Pergub/ SK			69 Pergub	530 Pergub/ SK	431 Pergub/ SK			690	177	150		
					300 SK					350 SK					117				
8	Jumlah Pendampingan Kasus Terkait Penyelenggaraan Pemerintahan				20 Kasus	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100%	175 Kasus	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100%	875	100	100	100	100
	Facilitasi Bantuan Hukum				6 Kali	8 Kali	8 Kali			6 Kali	8 Kali	8 Kali			100	100	100		
7	Unit Pelayanan Publik (UPP) yang telah menerapkan SOP, CPP dan CBAN				3 UPP	-	-	-	-	1 UPP	-	-	-	-	33	-	-	-	-

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA
			

NO.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS & FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TA RG ET NSP K	TA RG ET IK K	TARGET INDIKAT OR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN PADA TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE (%)				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah SKPD yang Telah Menempatkan SOP				32 OPD	-	-	-	-	32 OPD	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Laporan Standar Pelayanan Minimal yang tersusun				6 Dok	-	-	-	-	2 Dok	-	-	-	-	33	-	-	-	-
	Meningkatnya Capaian Penilaian Akuntabilitas Kinerja				1 Dok	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	100	-	-	-	-
9	Penataan Organisasi/Kelembagaan sesuai Perundang- undangan				-	3 Lap. Perubahan OPD dan 2 Lap Monev	3 Lap. Perubahan OPD dan 2 Lap Monev	1 Dokumen Penataan Org dan 1 Laporan SPM	3 Lap. Perubahan OPD dan 2 Lap Monev	-	3 Lap. Penetapan OPD dan 2 Lap Monev	3 Lap. Perubahan OPD dan 2 Lap Monev	1 Dokumen Penataan Org dan 1 Laporan SPM	3 Lap. Perubahan OPD dan 2 Lap Monev	-	100	100	100	100
10	Persentase Layanan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah				100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	100	100	100	100	-
11	Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang Berkualitas				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
12	Persentase Pengelolaan Keuangan dan Perencanaan yang Transparan dan Akuntabel				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
13	Persentase Sarana dan Prasarana yang Tersedia				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
14	Persentase pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Kedinasan Pemerintahan Provinsi Gorontalo				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
18	Efektivitas Pendampingan SKPD, Upgrade Sistem, Rapim, Rakorev, Konsolidasi dan Monev Pembangunan				Seluruh SKPD, 1 Aplikasi, 8x Rapim, 4x Rakorev, 6x Monev Kab/Kota, 4x Konsultasi	Seluruh SKPD, 1 Aplikasi, 8x Rapim, 4x Rakorev, 6x Monev Kab/Kota, 4x Konsultasi	Seluruh SKPD, 1 Aplikasi, 8x Rapim, 4x Rakorev, 6x Monev Kab/Kota, 4x Konsultasi	Seluruh SKPD, 1 Aplikasi, 8x Rapim, 4x Rakorev, 6x Monev Kab/Kota, 4x Konsultasi	Seluruh SKPD, 1 Aplikasi, 8x Rapim, 4x Rakorev, 6x Monev Kab/Kota, 4x Konsultasi	Seluruh SKPD, 1 Aplikasi, 8x Rapim, 4x Rakorev, 6x Monev Kab/Kota, 4x Konsultasi	Seluruh SKPD, 1 Aplikasi, 8x Rapim, 4x Rakorev, 6x Monev Kab/Kota, 4x Konsultasi	Seluruh SKPD, 1 Aplikasi, 8x Rapim, 4x Rakorev, 6x Monev Kab/Kota, 4x Konsultasi	Seluruh SKPD, 1 Aplikasi, 8x Rapim, 4x Rakorev, 6x Monev Kab/Kota, 4x Konsultasi	Seluruh SKPD, 1 Aplikasi, 8x Rapim, 4x Rakorev, 6x Monev Kab/Kota, 4x Konsultasi	100	100	100	100	100

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA
			

NO.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS & FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TA RG ET NSP K	TA RG ET IK K	TARGET INDIKAT OR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN PADA TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE (%)				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
19	Efektivitas Koordinasi/Monitoring/Pengendalian Bidang Ekonomi, Refleksi Ekonomi, Sosialisasi Fakta dan Angka, Tersusunnya Buku Indikator Ekonomi, Pembuatan/Penggunaan Sistem SiagadiniGo				3x Rekorev Ekonomi, 3x HLM TPID, 2x Rapat Sidak BBM, Refleksi Ekonomi Akhir Tahun, Sosialisasi Fakta dan Angka Atas Buku Indikator Ekonomi, 1 Aplikasi SiagadiniGo	3x Rekorev Ekonomi, 3x HLM TPID, 2x Rapat Sidak BBM, Refleksi Ekonomi Akhir Tahun, Sosialisasi Fakta dan Angka Atas Buku Indikator Ekonomi, 1 Aplikasi SiagadiniGo	3x Rekorev Ekonomi, 3x HLM TPID, 2x Rapat Sidak BBM, Refleksi Ekonomi Akhir Tahun, Sosialisasi Fakta dan Angka Atas Buku Indikator Ekonomi, 1 Aplikasi SiagadiniGo	3x Rakorev Ekonomi, 3x HLM TPID, 2x Rapat Sidak BBM	3x Rakorev Ekonomi, 3x HLM TPID, 2x Rapat Sidak BBM	3x Rekorev Ekonomi, 3x HLM TPID, 2x Rapat Sidak BBM, Refleksi Ekonomi Akhir Tahun, Sosialisasi Fakta dan Angka Atas Buku Indikator Ekonomi, 1 Aplikasi SiagadiniGo	3x Rekorev Ekonomi, 3x HLM TPID, 2x Rapat Sidak BBM, Refleksi Ekonomi Akhir Tahun, Sosialisasi Fakta dan Angka Atas Buku Indikator Ekonomi, 1 Aplikasi SiagadiniGo	3x Rekorev Ekonomi, 3x HLM TPID, 2x Rapat Sidak BBM, Refleksi Ekonomi Akhir Tahun, Sosialisasi Fakta dan Angka Atas Buku Indikator Ekonomi, 1 Aplikasi SiagadiniGo	3x Rakorev Ekonomi, 3x HLM TPID, 2x Rapat Sidak BBM	3x Rekorev Ekonomi, 3x HLM TPID, 2x Rapat Sidak BBM, Refleksi Ekonomi Akhir Tahun, Sosialisasi Fakta dan Angka Atas Buku Indikator Ekonomi, 9x Rapat Penyehatan BUMD, 9x Rapat Penyusunan SK Penetapan Tarif Batas Atas dan Bawah Air Minum 1x Sosialisasi	100	100	100	100	100
21	Cakupan meningkatnya kualitas layanan pengaduan, pendampingan OPD dan Strategi Kebijakan serta Informasi Pengaduan Barang/Jasa Pemerintah				Seluruh SKPD, 1 Aplikasi, 4x Penguatan, 6x Monev Kab/Kota, 120x Verifikasi, 2x Rakernas, 1x Rakornas	Seluruh OPD, ULP Kab/Kota, LPSE Kab/Kota, 1 Aplikasi, 1 Kategori 3x Penguatan, 5x FGD, 8x Sosialisasi, 215x Klarifikasi/Verifikasi, 1x Rakor Kab/Kota, 1x Rakor Wilayah, 1x Rakornas dan 3x Monev Kab.Kota	Seluruh OPD, ULP Kab/Kota, LPSE Kab/Kota, 1 Aplikasi, 1 Kategori 3x Penguatan, 5x FGD, 8x Sosialisasi, 215x Klarifikasi/Verifikasi, 1x Rakor Kab/Kota, 1x Rakor Wilayah, 1x Rakornas dan 3x Monev Kab.Kota	Seluruh OPD, ULP Kab/Kota, LPSE Kab/Kota, 1 Aplikasi, 1 Kategori 3x Penguatan, 5x FGD, 8x Sosialisasi, 215x Klarifikasi/Verifikasi, 1x Rakor Kab/Kota, 1x Rakor Wilayah, 1x Rakornas dan 3x Monev Kab.Kota	Seluruh OPD, ULP Kab/Kota, LPSE Kab/Kota, 1 Aplikasi, 1 Kategori 3x Penguatan, 5x FGD, 8x Sosialisasi, 215x Klarifikasi/Verifikasi, 1x Rakor Kab/Kota, 1x Rakor Wilayah, 1x Rakornas dan 3x Monev Kab.Kota	Seluruh SKPD, 1 Aplikasi, 4x Penguatan, 6x Monev Kab/Kota, 120x Verifikasi, 2x Rakernas, 1x Rakornas	Seluruh OPD, ULP Kab/Kota, LPSE Kab/Kota, 1 Aplikasi, 1 Kategori 3x Penguatan, 5x FGD, 8x Sosialisasi, 215x Klarifikasi/Verifikasi, 1x Rakor Kab/Kota, 1x Rakor Wilayah, 1x Rakornas dan 3x Monev Kab.Kota	Seluruh OPD, ULP Kab/Kota, LPSE Kab/Kota, 1 Aplikasi, 1 Kategori 3x Penguatan, 5x FGD, 8x Sosialisasi, 215x Klarifikasi/Verifikasi, 1x Rakor Kab/Kota, 1x Rakor Wilayah, 1x Rakornas dan 3x Monev Kab.Kota	Seluruh OPD, ULP Kab/Kota, LPSE Kab/Kota, 1 Aplikasi, 1 Kategori 3x Penguatan, 5x FGD, 8x Sosialisasi, 215x Klarifikasi/Verifikasi, 1x Rakor Kab/Kota, 1x Rakor Wilayah, 1x Rakornas dan 3x Monev Kab.Kota	Seluruh OPD, ULP Kab/Kota, LPSE Kab/Kota, 1 Aplikasi, 1 Kategori 3x Penguatan, 5x FGD, 8x Sosialisasi, 411x Klarifikasi/Verifikasi, 1x Rakor Kab/Kota, 1x Rakor Wilayah, 1x Rakornas dan 3x Monev Kab.Kota	100	100	100	100	100

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA
			

Dari Tabel tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja unit kerja lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo pada 4 (Empat) tahun terakhir sebesar 100% yang bermakna sangat tinggi dengan target yang ditetapkan sebesar 100% yang diperoleh berdasarkan perbandingan dari realisasi yang dicapai dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

Berkenaan dengan rasio realisasinya mencapai 100% dari target yang ditetapkan yang juga bermakna sangat tinggi. Untuk mencapai target ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo telah melaksanakan program pembangunan yang dijabarkan melalui kegiatan terkait dalam mendukung pelayanan kesekretariatan secara maksimal.

2.4 Anggaran dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo

Kinerja pelaporan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo, selain dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPD), juga dijabarkan melalui kinerja anggaran dan realisasi anggaran pembangunan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut.

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA
			

TABEL 2.5 (T.C-24)
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Ke-1	Ke-2	Ke-3	Ke-4	Ke-5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BELANJA	99.669.634.030	97.950.615.607	109.393.193.128	78.486.536.324	102.439.888.614	89.704.899.848	93.430.662.368	102.188.235.365	71.565.122.319	87.991.370.970	90,00	95,39	93,41	91,18	85,90	2,70	(1,95)
BELANJA OPERASI	89.885.398.072	87.393.288.607	99.500.872.349	75.347.705.074	96.832.604.478	83.030.250.768	83.264.102.018	92.631.933.625	68.463.659.358	82.610.506.798	92,37	95,28	93,10	90,86	85,31	7,17	(0,51)
Belanja Pegawai	34.282.002.947	26.360.932.975	26.582.782.047	33.766.317.280	26.872.008.985	27.000.054.769	26.342.103.346	26.413.408.203	32.650.743.974	26.339.076.904	78,76	99,93	99,36	96,70	98,02	(27,58)	(2,51)
Belanja Barang dan Jasa	55.603.395.125	61.032.355.632	72.918.090.302	41.491.387.794	60.269.645.064	56.030.195.999	56.921.998.672	66.218.525.422	35.722.915.384	48.071.429.894	100,77	94,27	90,81	86,10	79,76	7,74	(16,56)
Belanja Hibah	-	-	-	90.000.000	5.690.960.429	-	-	-	90.000.000	8.200.000.000	-	-	-	100,00	84,61	99,07	98,90
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	911.200.000	-	-	-	-	585.000.000	-	-	-	-	64,20	100,00	100,00
BELANJA MODAL	9.784.235.958	10.557.327.000	9.892.320.779	3.138.831.250	5.607.284.136	6.674.649.080	10.166.560.350	9.556.301.740	3.101.462.961	5.380.864.172	68,22	96,30	96,60	98,81	95,96	(74,49)	(24,04)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.174.235.958	9.783.489.000	8.629.820.779	3.003.831.250	5.464.764.910	5.121.015.580	9.426.728.250	8.415.512.007	2.966.877.961	5.239.218.389	62,65	96,35	97,52	98,77	95,87	(49,58)	2,26
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.480.000.000	773.838.000	1.192.500.000	-	-	1.425.081.000	739.832.100	1.092.599.733	-	-	96,29	95,61	91,62	-	-	(24,11)	(30,43)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	105.000.000	-	-	135.000.000	113.000.000	104.052.500	-	-	134.585.000	112.462.900	-	-	-	99,69	94,52	7,08	7,48
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	25.000.000	-	70.000.000	-	29.519.226	24.500.000	-	48.190.000	-	29.182.883	98,00	-	68,84	-	-	15,31	16,05

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASIS- TEN	SEKDA
			

Berkenaan dengan rasio realisasi anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo untuk semua program yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo selama 4 (empat) tahun dapat terlaksana dengan efektif dan efisien dikarenakan dengan anggaran yang ada seluruh kegiatan yang didanai dapat dilaksanakan dan mencapai sasaran yang telah ditentukan.

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo

Dalam upaya mengoptimalkan daya guna dan hasil guna suatu pelayanan dan pembangunan, Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo memiliki peran strategis untuk menjawab tantangan perkembangan masyarakat dinamis yang terus berkembang dalam meningkatkan kinerja pelayanan pembangunan. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi bergantung pada kemampuan manajerial dalam membawa organisasi untuk melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu, analisis terhadap lingkungan merupakan hal yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan dilakukan baik di lingkungan internal maupun eksternal. Analisis lingkungan eksternal dilakukan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo menghadapi berbagai tantangan maupun peluang untuk dapat melaksanakan pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah yang dapat diuraikan sebagai berikut.

A. Kekuatan (Strengths)

- 1. Adanya peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pelaksanaan tugas dan adanya kewenangan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan bidang administrasi pemerintahan umum, administrasi pembangunan daerah, dan kemasyarakatan.
- 2. Visi dan Misi organisasi yang jelas.
- 3. Adanya Uraian Tugas Unit Kerja sesuai dengan Tupoksi.
- 4. Komitmen dan kemauan pimpinan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

B. Kelemahan (Weakness)

- 1. Kualitas SDM Aparatur yang belum memadai.
- 2. Belum optimalnya dukungan dalam penerapan kebijakan.
- 3. Belum lengkapnya prosedur operasi baku (*Standard Operating Procedure*).
- 4. Belum optimalnya pemahaman atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- 5. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi.
- 6. Kurangnya kualitas sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

C. Peluang (Oppurtunities)





- 1. Adanya dukungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam pelaksanaan tugas organisasi.
- 2. Agenda pembangunan yang lengkap.
- 3. Kondisi dan situasi wilayah Provinsi Gorontalo yang relatif stabil dan kondusif.
- 4. Pengembangan teknologi informasi dan pengembangan jaringan sistem informasi manajemen dengan seluruh Perangkat Daerah Provinsi.

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA
f	f	↙	δ

5. Adanya Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan.
6. Adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam upaya mewujudkan *good governance*, penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja, dan upaya pencegahan KKN.

D. Tantangan / Ancaman (Threats)

1. Adanya tuntutan untuk menerapkan *good governance* dan *clean government*.
2. Melaksanakan sinergi antara *good governance* dan *reinventing government*.
3. Rendahnya tingkat disiplin sebagian pegawai.
4. Kebijakan Refocussing anggaran.
5. Kebijakan yang sewaktu-waktu dapat berubah (fleksibel).
6. Masih terjadinya tumpang-tindih / *overlapping* tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
7. Lemahnya peraturan perundang-undangan mengenai penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan sanksi tindak lanjut hasil pengawasan.
8. Rendahnya mutu pelayanan publik (tuntutan masyarakat atas pelayanan publik yang prima).

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah, Sekretariat Daerah Gorontalo masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan tugas yang harus menjadi tujuan perbaikan, antara lain:





- 1. Koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan belum berjalan optimal;
- 2. Sistem, prosedur dan mekanisme kerja birokrasi belum terlaksana secara efektif dan efisien;
- 3. Etos dan disiplin kerja sumber daya aparatur yang efisien dan efektif belum membudaya;
- 4. Sarana dan prasarana kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi belum sesuai dengan standar kebutuhan;
- 5. Kompetensi dan distribusi sumber daya aparatur belum merata;
- 6. Sistem penilaian dan pengukuran kinerja dalam penerapan reward and punishment belum optimal;
- 7. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum optimal.

3.2 Telaahan Terhadap Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 dirumuskan berdasarkan kebijakan penyusunan rencanan pembangunan daerah bagi kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022, dimana penyusunannya dilakukan secara teknokratik. RPD 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan mempedomani Nawacita, arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2007-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Mengacu pada fokus-fokus pembangunan yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Gorontalo dan memperhatikan RPJMN 2020-2024 serta menelaah rumusan isu-isu strategis daerah, maka kebijakan utama pembangunan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 adalah

- 1. Peningkatan Ekonomi Daerah
Pembangunan ekonomi akan dititikberatkan pada Pengelolaan sumber daya ekonomi sesuai dengan potensi daerah yaitu pertanian, kelautan dan perikanan serta kehutanan dan mendorong peningkatan nilai tambah pertanian, perikanan, industri, pariwisata serta ekonomi kreatif dan digital.
- 2. Pengembangan Wilayah dan Pedesaan
Pengembangan wilayah dan pedesaan akan difokuskan dengan mengkoordinasikan seluruh stakeholders pembangunan pada Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan bagi wilayah yang belum berkembang dan peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata.

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASIS/EN	SEKDA
			

3. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Pembangunan sumberdaya manusia dititikberatkan pada Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, Peningkatan layanan pendidikan yang lebih berkualitas, pelaksanaan perlindungan social, Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, juga mendorong upaya Pengentasan kemiskinan dan Peningkatan produktivitas tenaga kerja.

4. Peningkatan Kebudayaan dan Agama

Pembangunan kebudayaan dan agama akan didorong melalui peningkatan pelestarian kebudayaan dan budaya llerasi serta meningkatkan pemahaman dan kerukunan beragama.

5. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis

Pembangunan infrastruktur dititikberatkan pada Pembangunan infrastruktur layanan dasar, Pembangunan konektivitas transportasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

6. Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan

Pembangunan lingkungan hidup dan ketahanan bencana diarahkan melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

7. Terwujudnya Clean and Good Government.

Pembangunan diarahkan pada peningkatan pelayanan public berkualitas, percepatan Reformasi Birokrasi serta peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat.





Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka disimpulkan bahwa tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo berkaitan dengan pencapaian Kebijakan Utama ke 4 (empat) yaitu Peningkatan Kebudayaan dan Agama yang salah satu sasarannya yaitu meningkatkan pelestarian kebudayaan dan agama dimana fungsi keagamaan dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Gorontalo. Selain itu pula dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah sebagai pembantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif juga mendukung terwujudnya Kebijakan Utama ke 7 (tujuh) dalam RPD 2023-2026 yakni Terwujudnya Clean and Good Government dengan sasaran utama yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga

Dalam proses penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 sebagaimana tersebut di atas. Selain itu perumusan dokumen Renstra Sekretariat Daerah memperhatikan tugas dan fungsi beberapa Kementerian dan Lembaga Negara yang berkesesuaian dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo antara lain:

a. Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri RI

Peran dan mandat Kementerian Dalam Negeri dijabarkan pada tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang urusan dalam negeri. Visi Kementerian Dalam Negeri sebagai cerminan peran dan kondisi yang ingin diwujudkan di masa yang akan datang.

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA
			

Hal tersebut sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya pengembangan dan pematapan penyelenggaraan sistim pemerintahan dan politik dalam negeri sejalan dengan semangat reformasi yang peletakkan dasar-dasarnya telah diinisiasi pada masa-masa sebelumnya.

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 Rumusan Visi yang diangkat dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri 2020-2024 merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai kondisi obyektif lingkungan strategis lingkup Kementerian Dalam Negeri dalam lima tahun ke depan, yaitu:





"Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"

Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Adaptif:
Adaptif atau kematangan diri untuk menyesuaikan dalam setiap keadaan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri ke depan mampu memposisikan sebagai Kementerian yang dapat mengikuti setiap perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi dan bersifat terbuka dalam menerima perubahan yang cepat.
- 2. Profesional:
Kementerian Dalam Negeri mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan pelayanan public yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3. Proaktif:
Dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu bertindak lebih daripada sekedar mengambil inisiatif guna mewujudkan pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
- 4. Inovatif:
Inovatif dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pembaharuan terhadap sumber daya yang ada, sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi.

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

- 1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
- 2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pematapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi;

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA
			

3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelenggaraan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Berdasarkan uraian di atas, jika ditinjau visi dan misi Kementerian Dalam Negeri dapat dikemukakan bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi pendorong pelayanan di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo yaitu:





1. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah harus sejalan dengan semangat Adaptif yang tertuang dalam visi Kementerian Dalam Negeri yaitu Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo dituntut harus menjadi Perangkat Daerah yang dapat menyesuaikan dengan keadaan dan dinamika pemerintahan yang terjadi, terbuka dan cepat dalam melaksanakan perubahan guna menyesuaikan kondisi yang ada;
2. Sekretariat Daerah harus Profesionalitas yang dimana harus mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan pelayanan public yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
3. Sekretariat Daerah harus Proaktif dimana mampu bertindak lebih daripada sekedar mengambil inisiatif guna mewujudkan pencapaian visi dan misi pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026;
4. Sekreteriat Daerah harus mendorong terciptanya Inovasi dalam pelayanan. Yang dapat dimaknai bahwa Sekretariat Daerah memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pembaharuan terhadap sumber daya yang ada, sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Provinsi Gorontalo.

b. Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, telah ditetapkan visi dan misi jangka menengah Kementerian PAN-RB 2020-2024 sebagai tindaklanjut dari RPJMN 2020-2024. Adapun visi dari Kementerian PAN-RB yaitu:

“Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi presiden dan wakil presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan Gotong Royong”.

Visi di atas mencerminkan cita-cita dan harapan Kementerian PANRB untuk menjadikan seluruh aparatur negara di lingkungan instansi pemerintah pusat dan

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA
			

daerah memiliki integritas yang tinggi melaksanakan tugasnya sehari-hari serta memiliki kompetensi yang dapat diandalkan untuk selalu berkinerja tinggi dalam menjalankan perannya mewujudkan visi dan misi presiden dan wakil presiden. Kementerian PANRB merumuskan dan menetapkan beberapa misi yang harus diembannya guna melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam rangka Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Terpercaya dengan uraian sebagai berikut:

1. Menciptakan Kelembagaan dan Tata Kelola Birokrasi yang Ramping, Lincah, Terintegrasi dan Berbasis Elektronik – digital bureaucracy;
2. Membangun SDM Aparatur yang Adaptif, Profesional, Kompetitif dan Berwawasan Global;
3. Mengembangkan Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel;
4. Menciptakan Sistem Pengawasan yang Profesional, Independen dan Berintegritas;
5. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel dan Melayani; dan
6. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditelaah bahwa Visi dan Misi yang telah ditetapkan oleh Kementerian PAN selaras dengan kebijakan utama RPD Provinsi Gorontalo 2022-2026 dan sejalan pula tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo sehingga dapat saling mendukung satu dengan yang lain.

c. Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah





LKPP berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LKPP di bawah koordinasi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas

Di samping melaksanakan program sesuai visi-misi, tujuan dan sasaran strategis, LKPP juga bertanggungjawab untuk mencapai sasaran-sasaran nasional seperti diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014, dengan prioritas di bidang aparatur pemerintahan yang baik, peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Secara spesifik, fungsi dan kewenangan lembaga ini adalah penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Visi LKPP **“Terwujudnya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai Penggerak Utama dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Mewujudkan Indonesia Maju, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Untuk mencapai visi tersebut, LKPP melaksanakan misi pertama Presiden, Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, Misi Kedua Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing serta Misi Kedelapan, Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya yang dirumuskan ke dalam 3 (tiga) misi LKPP yaitu:

1. Menerapkan kebijakan pengadaan yang responsif dan mendorong kemandirian bangsa sesuai dengan kemajuan teknologi dimaknai berdasarkan Peraturan

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA
			

Presiden Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang memiliki fungsi penyusunan dan perumusan strategis serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang fleksibel terhadap perubahan dan dapat menjawab masalah dalam PBJ, disertai dengan kemampuan untuk membangun bangsa dalam rangka mendorong pembangunan menggunakan kemajuan teknologi.

- 2. Mengembangkan proses bisnis pengadaan berbasis elektronik dan pengelolaan SDM pengadaan yang adaptif dimaknai sebagai proses pengadaan barang/jasa yang dioptimalkan melalui penggunaan sistem pengadaan secara elektronik sebagai bentuk percepatan PBJP dan agar meningkatnya independensi, transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan yang dilaksanakan oleh SDM yang kompeten dan berdaya saing tinggi.

Meningkatkan akuntabilitas PBJ dimaknai sebagai suatu upaya LKPP dalam mengatasi permasalahan PBJ secara transparan, akuntabel dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan yang baik.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Tujuan telaahan rencana tata ruang wilayah adalah untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang tata ruang mengamanahkan bahwa perlunya penataan tata ruang yang berkualitas aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Penjabaran lebih lanjut mengenai hal ini maka pada tahun 2011 disahkannya Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Perubahan (RTRWP) Provinsi Gorontalo untuk jangka waktu 20 tahun (2010-2030).

Penyusunan RTRWP ini bertujuan untuk mewujudkan tatanan ruang wilayah provinsi yang memiliki keseimbangan *ekonomi, ekologi* dan *sosial budaya, serta mendukung pertahanan dan keamanan nasional* dalam rangka optimalisasi potensi sumber daya alam berbasis pertanian dan perikanan melalui inovasi dan pengembangan kualitas sumber daya manusia menuju Gorontalo yang maju dan mandiri. Penataan ruang yang serasi, seimbang dan berkelanjutan pada gilirannya akan meningkatkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor, kualitas lingkungan hidup akan lestari. **Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PerMen PU) No.15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi** merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Sasaran penyusunan RTRW Provinsi Gorontalo adalah :

- 1). Terkendalinya pemanfaatan ruang lintas Kabupaten di wilayah Provinsi Gorontalo baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat dan swasta
- 2). Terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan kawasan budidaya lintas Kabupaten/Kota
- 3). Tersusunnya arahan pengembangan sistem pusat-pusat permukiman perkotaan dan perdesaan dalam sistem struktur ruang Provinsi
- 4). Tersusunnya arahan pengembangan sistem prasarana wilayah Provinsi

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA
			

5). Terkoordinasinya pembangunan antar wilayah dan antar sektor

Sedangkan rencana struktur tata ruang wilayah Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :

1. Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Perkotaan dan Pusat Kegiatan pusat dan kegiatan perkotaan dalam hierarki skop pelayanannya berupa Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang skop pelayanannya Provinsi, maupun Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang skop pelayanannya Kabupaten di wilayah Provinsi Gorontalo
2. Rencana Pengembangan Sistem Transportasi
Diarahkan dengan memelihara dan memperbaiki kualitas (permukaan dan lebar) jalur-jalur yang telah ada serta menambah jalur-jalur
3. Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Energi
Meliputi Pembangkit tenaga listrik, jaringan transmisi tenaga listrik dan jaringan migas
4. Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Telekomunikasi
Meliputi sistem jaringan telekomunikasi tetap, jaringan telekomunikasi khusus, jaringan stasiun televisi lokal dan jaringan stasiun radio lokal, sistem jaringan mikro digital di wilayah Provinsi Gorontalo
5. Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Meliputi Rencana Sistem Sumber Air dan Jaringan Irigasi, Air Bersih, Sistem Jaringan Drainase dan Pengelolaan Air Limbah, Rencana Sistem Jaringan Prasarana Persampahan




Sebagaimana tujuan telaahan rencana tata ruang wilayah adalah untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD yang jika dihubungkan dengan tupoksi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo sebagai SKPD yang memberikan pelayanan terhadap perangkat daerah masyarakat.

Jika mengacu pada maka kebijakan pengembangan struktur ruang yang salah satunya yaitu peningkatan kualitas ketersediaan infrastruktur dasar dan infratstruktur pendukung yang terpadu dan merata di seluruh Provinsi Gorontalo. Berdasarkan struktur dan letak Perkantoran Pemerintah Provinsi Gorontalo yang masih belum terpadu dalam 1 (satu) kompleks perkantoran dan masih terbagi pada beberapa kawasan sehingga dikhawatirkan dapat menghambat pelayanan administrasi pemerintahan Provinsi Gorontalo. Adapun Sekretariat Daerah yang berlokasi pada Kantor Gubernur Gorontalo yang merupakan infrastruktur penunjang pelaksanaan pemerintahan daerah masih sulit untuk dijangkau oleh pengguna layanan dikarenakan lokasi kantor yang berada di wilayah perbukitan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, mengingat belum terpadunya Kawasan perkantoran Pemerintah Provinsi Gorontalo maka untuk menunjang kelancaran tugas Sekretariat Daerah sebagai pelaksana pelayanan public membutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung sehingga hambatan dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada Perangkat Daerah dan masyarakat bisa diminimalisir.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Beberapa isu strategis diprediksi akan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo. Isu strategis tersebut akan digunakan untuk

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA
			

mengantisipasi berbagai masalah yang dihadapi dan untuk memberikan arah bagi perumusan berbagai program kegiatan Sekretariat Daerah pada tahun-tahun mendatang.

Dalam melaksanakan dan mewujudkan Kebijakan Utama Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo 2023-2026 terdapat beberapa isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Gorontalo sebagai berikut:

1. Biro Pemerintahan dan Kesra





Adapun isu-isu yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Biro Pemerintahan dan Kesra antara lain:

- a. Penegasan Batas daerah; Meskipun Permendagri tentang batas daerah telah ditetapkan namun masih terdapat klaim batas daerah antar Kab/Kota, sehingga perlu mendapat perhatian utama agar stabilitas daerah kondusif.
- b. Penegasan batas daerah perlu lebih dimaksimalkan, agar dapat meningkatkan koordinasi yang lebih intensif baik antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Kecamatan maupun Desa, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan pemasangan pilar batas. Dalam periode renstra 2023-2026 pemasangan pilar yang direncanakan di beberapa lokasi yang dianggap penting diantaranya Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo dengan Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Buol, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Buol, Kabupaten parimo dan kabupaten Pohuwato dan kabupaten boalemo serta kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo.
- c. Pengembangan Daerah Otonom Baru; dalam rangka memperpendek rentang kendali terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, perlu diusulkan pemekaran Kab/Kota di Provinsi Gorontalo
- d. Optimalisasi kerjasama antar pemerintah Daerah, Vertikal dan Swasta; bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, saat ini Provinsi Gorontalo sangat bergantung pada dana transfer daerah, sehingga perlu dioptimalkan kerjasama baik antar pemerintah daerah, vertical maupun swasta untuk mendapatkan sumber dana tambahan PAD.
- e. Peningkatan sumber daya manusia; bahwa selain mempunyai fungsi koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan, juga mempunyai peran pemberian bantuan Pendidikan berupa beasiswa bagi masyarakat umum.
- f. Peningkatan kualitas pendidikan agama dan sarana prasarana pusat pembinaan mental spiritual; sehingga perlu adanya pemberian bantuan social dan hibah keagamaan.

2. Biro Hukum

Isu-isu yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Biro Hukum antara lain:

- a. Terbatasnya produk hukum yang ditindaklanjuti oleh Stakeholders terkait;
- b. Terbatasnya sumber daya aparatur yang memiliki keahlian dalam penyusunan dalam produk hukum daerah, sehingga ini mempengaruhi kinerja dalam rangka pelayanan kepada Perangkat Daerah;


KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA
			

- c. Belum maksimalnya Penyebarluasan Produk Hukum kepada masyarakat baik secara sosialisasi langsung maupun secara digitalisasi berupa akses website JDIH yang tidak dimbangi dengan alokasi anggaran;
- d. Belum adanya Penguatan sinergi dan koordinasi dengan Bapem Perda DPRD dan OPD dalam menyusun analisis kebutuhan Perda;
- e. Belum adanya Peningkatan kapasitas SDM untuk perancangan produk hukum;
- f. Belum adanya Penguatan tim penyusun produk hukum;
- g. Penyesuaian organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bagian ini baru terbentuk pada Biro Hukum yang tugasnya pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang produk hukum daerah Kabupaten/Kota yang tidak dimbangi dengan alokasi anggaran;
- h. Keterbatasan waktu fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- i. Terbatasnya sumber daya aparatur yang memiliki keahlian dalam evaluasi produk hukum daerah Kabupaten/Kota, sehingga ini mempengaruhi kinerja dalam rangka pelayanan kepada Kabupaten/Kota;
- j. Terbatasnya Fasilitasi Pendampingan/advokasi kab/kota dalam perumusan produk hukum;
- k. Pelaksanaan fasilitasi pemberian bantuan hukum kepada Masyarakat miskin yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum, tidak dimbangi dengan alokasi anggaran;
- l. Pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka pelaksanaan isbath nikah yang alokasi anggaran terbatas sementara pasutri masih banyak belum memiliki buku nikah;
- m. Belum adanya Penguatan Pendampingan Terhadap LKBH KORPRI;
- n. Belum maksimalnya Fasilitasi Pendampingan Bantuan Hukum Kepada Penyelenggara Pemerintah dan Keluarga Miskin;
- o. Masih kurangnya Penguatan Kapasitas kepada OBH terhadap Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin;
- p. Minimnya Penataan Lembaga, Penguatan Manajemen ASN, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Kualitas Perencanaan, Penata Usahaan Keuangan dan Pengawasan.



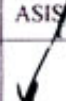

3. Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan

Isu-isu strategis pelaksanaan tugas Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan antara lain:

- a. Kualitas penyelenggaraan koordinasi dan evaluasi kegiatan pembangunan tingkat provinsi masih perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat melalui frekwensi rapat koordinasi dan evaluasi pembangunan, respon aparat untuk hadir, dan jumlah rekomendasi yang diakomodir. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2010 yang direvisi menjadi PP No. 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, memperkuat tupoksi Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Rakorev tingkat provinsi;

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA
			

- b. Kualitas penyelenggaraan Rapat Pimpinan (Rapim) masih perlu ditingkatkan, dimana tidak hanya memberikan perhatian khusus bagi SKPD dengan tingkat capaian pelaksanaan fisik dan serapan anggaran yang tidak memenuhi target, namun juga bagi OPD yang kurang memperhatikan capaian outcome/hasil dan impact/dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dari pelaksanaan program pembangunan yang dilaksanakan. Hal ini dapat diukur dari frekuensi Rapim yang diadakan dan jumlah rekomendasi yang diakomodir setelah pelaksanaan Rapim;
- c. Lambatnya penyerapan anggaran belanja pada APBD Provinsi Gorontalo. Isu ini memantapkan peran Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan pada fungsi pengendalian pembangunan, meliputi penguatan peran TEPPA Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan dalam penyediaan data yang akurat dan real time untuk solusi dan deteksi dini atas permasalahan lapangan melalui pemanfaatan sistem aplikasi e-monev, peningkatan kualitas koordinasi dan evaluasi kinerja OPD melalui Rapim dan peningkatan intensitas dan kualitas monitoring lapangan dan evaluasi untuk percepatan pelaksanaan penyelesaian kegiatan pembangunan yang mengalami hambatan;
- d. Pemanfaatan Sistem e-monev (elektronik monitoring evaluasi dan pelaporan) demi terselenggaranya sistem informasi e-monev mencakup pelaporan realisasi capaian pembangunan, baik kinerja serapan keuangan maupun kinerja fisik pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. Lambatnya peningkatan ekonomi kerakyatan di Provinsi Gorontalo. Isu ini memantapkan peran Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan pada fungsi pengendalian ekonomi, meliputi penguatan peran Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan dalam penyediaan data yang akurat dan real time untuk solusi dan deteksi dini terjadinya inflasi dan lonjakan harga di pasaran melalui pemanfaatan sistem aplikasi e-siagaDiniGo, peningkatan kualitas koordinasi melalui HLM (*High Level Meeting*) TPID, Rakorev bidang ekonomi, Monitoring Ketersediaan BBM dan Monitoring LPG;
- f. belum berjalan optimalnya kontribusi BUMD dalam peningkatan perekonomian daerah, sehingga hal ini menyebabkan belum terpenuhinya tujuan pendirian BUMD dalam memajukan ekonomi daerah dan mendukung pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pembangunan termasuk memberi kontribusi bagi pemerintah daerah dalam bentuk Deviden;
- g. belum adanya BUMD air minum di Provinsi Gorontalo yang memiliki tarif yang full cost recovery, sehingga berdasarkan Permendagri 21 tahun 2020, memberikan kewenangan kepada Gubernur menetapkan tarif batas atas dan tarif batas bawah air minum untuk kabupaten/kota dan provinsi;
- h. Belum melakukan penyesuaian bentuk hukum BUMD yang dimiliki provinsi baik menjadi berbentuk Perumda maupun Perseroada sebagaimana diatur dalam PP 54 tahun 2017 tentang BUMD;
- i. Belum dilaksanakan seleksi calon anggota komisaris dan anggota direksi BUMD yang baru dimana masa jabatan komisaris dan direksi yang lama sudah berakhir, sebagaimana diatur dalam PP 54 tahun 2017;
- j. Permasalahan BLUD RSUD dr. Hasri Ainun Habibie yang kami ringkas pertama adalah ketidakselarasan pemahaman BLUD di pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak tersebut seperti Dinas Kesehatan, Keuangan

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA
			

Daerah, dan BPK. Perubahan menjadi BLUD ini memang membawa kemudahan dalam hal fleksibilitas pengelolaan keuangan berupa pendapatan fungsional dapat langsung digunakan untuk operasional pelayanan tanpa harus disetor ke kas daerah, namun bukan itu yang menimbulkan permasalahan melainkan perubahan pola manajemen dan paradigma seluruh unsur di dalam organisasi BLUD.





Untuk itu hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pihak Pemerintah Provinsi Gorontalo antara lain adalah;

- 1. Memberikan pengutan peran Pemerintah Provinsi dalam pembinaan BLUD.
- 2. Menyiapkan regulasi yang dibutuhkan dalam rangka implementasi pengelolaan keuangan BLUD.
- 3. Meningkatkan kapasitas SDM Pengelola, Pembina dan Pengawas Keuangan BLUD.
- 4. Mengalokasikan anggaran pada APBD sebagai dukungan pengelolaan keuangan BLUD.

4. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Isu-isu Strategis dalam pelaksanaan tugas Biro Pengadaan Barang dan Jasa antara lain:

- a. Keterlambatan proses pengadaan barang/jasa dan proses pemilihan penyedia yang disebabkan oleh Proses Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Barang/Jasa yang menjadi kewenangan perangkat daerah;
- b. Keengganan personil perangkat daerah untuk terlibat dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah karena adanya pandangan yang negatif karena kecenderungan kriminalisasi kesalahan administrasi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang ada dianggap sebagai tindak pidana korupsi;
- c. Kuantitas sumber daya manusia PBJ yang ada masih kurang. Selain itu rencana pengembangan SDM melalui pelatihan dan Pendidikan juga belum lengkap;
- d. Banyaknya pemangku kepentingan belum memahami alur proses pengadaan barang/jasa sesuai system pengadaan yang telah ditetapkan;
- e. Banyaknya permasalahan pengadaan barang/jasa yang disebabkan pelaku pengadaan belum memiliki kapasitas dan kompetensi yang dibutuhkan;
- f. Kualitas penyelenggaraan dukungan pengadaan barang/jasa masih kurang optimal karena masih perlu pengembangan sistem informasi dan kompetensi sumber daya manusia pengadaan barang/jasa, kematangan kelembagaan UKPBJ serta belum memadainya sarana prasarana;
- g. Kurangnya perhatian dan pemahaman dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) selaku pemangku kepentingan pada Perangkat Daerah yang meliputi:
 - Mengupdate data SIRUP secara berkala setiap terjadi perubahan Rencana Umum Pengadaan;
 - Melakukan proses pengadaan langsung secara eletronik melalui aplikasi SPSE;
 - Melakukan proses pencatatan non tender maupun swakelola;
 - Melakukan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dnegan mekanisme aturan pengadaan yang berlaku.

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA
			

5. Biro Organisasi

Isu-isu yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Biro Organisasi antara lain:

a. Mendorong Percepatan Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 telah memasuki fase terakhir dalam pelaksanaannya. Biro Organisasi harus mendorong langkah-langkah strategis dalam mempercepat pelaksanaan area perubahan yang menjadi cakupan tugas Biro Organisasi, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Organisasi, Tatalaksana, dan Peningkatan Pelayanan Publik.

b. Implementasi Sistem Merit.

Percepatan Reformasi Birokrasi juga mencakup penerapan sistem merit dalam penerapan SDM aparatur didasarkan pada 3 (tiga) pilar, yaitu kualifikasi, kompetensi dan kinerja. Biro Organsasi ikut mendorong penyiapan bahan perumusan kebijakan pada 3 (tiga) pilar agar bisa dilaksanakan dengan optimal.

c. Pemerintahan Digital.

Model pelayanan berbasis teknologi informasi saat ini adalah sebuah kebutuhan. Hal ini berimplikasi pada perubahan mindset dan perilaku birokrasi dari pelayanan manual kepada pelayanan digital. Proses ini mencakup upaya inisiasi, regulasi dan asistensi penerapan tatalaksana pelayanan internal pemerintah daerah maupun pelayanan eksternal kepada masyarakat berbasis teknologi informasi.

d. Penataan Organisasi.

Penataan Kelembagaan dengan penyesuaian organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terdapat beberapa OPD yang bertumpuk pada satu wadah, sehingga perlu penyesuaian/perubahan untuk mendapatkan OPD yang ideal/tepat ukuran.

e. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



Isu akuntabilitas mencakup pentingnya membangun sistem akuntabilitas di kalangan aparatur, baik terkait dengan isu perencanaan program/kegiatan, penganggaran, penetapan kinerja, pengorganisasian, penatausahaan, monitoring, pengendalian maupun pelaporannya.

f. Optimalisasi pelayanan publik.

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima oleh penyelenggara pelayanan publik semakin meningkat. Penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk selalu mengembangkan inovasi pelayanan publik antara lain melalui gerakan One Agency One Innovation.

g. Dinamika Regulasi dan Kebijakan Pemerintah yang cepat.

Dinamika regulasi dan kebijakan Pemerintahan Pusat pasti berdampak pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Misalnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hal ini

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA
			

h. Pengarusutamaan gender.

Penerapan pengarusutamaan gender terus didorong dan menjadi bagian integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan. Biro Organisasi ikut memfasilitasi integrasi keberpihakan kesetaraan gender pada 5 sasaran affirmative action yakni perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok tidak mampu/miskin.

6. Biro Umum

Isu-isu strategis dalam pelaksanaan tugas Biro Umum antara lain:

- a. Penyelenggaraan administrasi surat-menyurat di Lingkungan Biro Umum belum menggunakan Digitalisasi;
- b. Data Kepegawaian di Lingkungan Setda belum up to date;
- c. Belum efektifnya sistem manajemen aset di Lingkungan Biro Umum;
- d. Kurangnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki keahlian teknis khususnya Pengadaan Barang Jasa dan Teknis Konstruksi serta Tenaga Konsultan Perencanaan;
- e. Kurangnya ASN dengan kompetensi teknis seperti Kelistrikan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan;
- f. Kualitas Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah masih belum optimal;
- g. Belum adanya penanggungjawab pengelola barang inventaris dinas di Lingkungan Rumah Jabatan Pimpinan;
- h. Belum efektifnya penyusunan dokumen laporan keuangan di Lingkungan Setda Provinsi Gorontalo;
- i. Pelayanan keprotokolan pimpinan khususnya dalam penyusunan agenda pimpinan belum optimal;

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASIS/EN	SEKDA
			

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN





Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan.

Berdasarkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2022-2026, Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan tugas dan fungsinya menetapkan, tujuan, dan sasaran sebagai berikut:

1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan;
2. Peningkatan Pemajuan Nilai Keagamaan sebagai Bagian Pembangunan Daerah;





Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo juga mempunyai beberapa sasaran yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Terwujudnya Percepatan Agenda Perubahan Reformasi Birokrasi melalui Peningkatan Tata Laksana Fasilitasi Kesra Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar;
2. Terwujudnya Meningkatnya Kualitas Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Terwujudnya Percepatan Agenda Perubahan Reformasi Birokrasi melalui Penataan Produk Hukum Daerah dan Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
4. Terwujudnya Percepatan Agenda Perubahan Reformasi Birokrasi melalui Peningkatan Tata Laksana Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan;
5. Terwujudnya Percepatan Agenda Perubahan Reformasi Birokrasi melalui Peningkatan Tata Laksana Pengadaan Barang dan Jasa;
6. Terwujudnya Percepatan 8 Agenda Reformasi Birokrasi melalui Fasilitasi dan Pendampingan terhadap Perangkat Daerah;
7. Terwujudnya Percepatan Agenda Perubahan Reformasi Birokrasi melalui Peningkatan Tata Laksana Pelayanan Pimpinan;
8. Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD;
9. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola dan Kualitas Sarana Prasarana Bina Mental Spiritual.





KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA
			

TABEL 4.1 (T.C-25)
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				PELAKSANA
					2023	2024	2025	2026	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
1	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Kematangan Organisasi	1 Terwujudnya Percepatan Agenda Perubahan Reformasi Birokrasi melalui Peningkatan Tata Laksana Fasilitas Kesra Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar	Persentase Fasilitas Kegiatan Kesra Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar	100%	100%	100%	100%	Biro Pemerintahan dan Kesra
		Nilai SAKIP OPD	2 Meningkatnya Kualitas Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan LPPD dengan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	Biro Pemerintahan dan Kesra
			3 Terwujudnya Percepatan Agenda Perubahan Reformasi Birokrasi melalui Penataan Produk Hukum Daerah dan Penyelenggaraan Bantuan Hukum	Persentase Produk Hukum Yang ditindaklanjuti (SK, Pergub dan Perda)	100%	100%	100%	100%	Biro Hukum
				Persentase Produk Hukum (Ranperda) yang mendapat persetujuan Kementerian Dalam Negeri	100%	100%	100%	100%	
				Persentase Bantuan Hukum yang difasilitasi Pendampingannya	100%	100%	100%	100%	
			4 Terwujudnya Percepatan Agenda Perubahan Reformasi Birokrasi melalui Peningkatan Tata Laksana Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Rekomendasi Bidang Ekonomi Yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan
				Persentase Rekomendasi Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Yang ditindak lanjuti Dalam Rangka Penyerapan Anggaran	100%	100%	100%	100%	





KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA
			

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				PELAKSANA	
					2023	2024	2025	2026		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	
			5	Terwujudnya Percepatan Agenda Perubahan Reformasi Birokrasi melalui Peningkatan Tata Laksana Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ	9/9 Proaktif	3/9 Strategis	6/9 Strategis	9/9 Strategis	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			6	Terwujudnya Percepatan 8 Agenda Reformasi Birokrasi melalui Fasilitasi dan Pendampingan terhadap Perangkat Daerah	Persentase OPD yang mengalami Peningkatan Nilai IRB	100%	100%	100%	100%	Biro Organisasi
			7	Terwujudnya Percepatan Agenda Perubahan Reformasi Birokrasi melalui Peningkatan Tata Laksana Pelayanan Pimpinan	Persentase Fasilitasi Pelayanan Umum dan Pimpinan	100%	100%	100%	100%	Biro Umum
			8	Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	Indeks Budaya Kerja	Belum Bagus	Belum Bagus	Bagus	Bagus	Seluruh Biro
					Nilai Pengawasan Kearsipan OPD	Sangat Kurang	Sangat Kurang	Cukup	Cukup	
					Indeks Pembangunan Statistik OPD	2,5	2,6	2,7	2,8	
					Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B	B	A	
2	Peningkatkan Pemajuan Nilai keagamaan sebagai Bagian Pembangunan Daerah	Indeks Kerukunan Umat Beragama	1	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola dan Kualitas Sarana Prasarana Bina Mental Spiritual	Persentase Lembaga Bina Mental Spiritual yang ditingkatkan Kapasitas Tata Kelola dan Kualitas Sarana Prasarana	100%	100%	100%	100%	Biro Pemerintahan dan Kesra

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASIS/EN	SEKDA
			





BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan dan program. Sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih (*Clean and Good Government*) yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2022-2026, maka untuk mewujudkan koordinasi, pembinaan dan pelayanan yang profesional, Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo menetapkan strategi dan arah kebijakan sebagaimana tertuang pada tabel 5.1 dan table 5.2 berikut :



KARO HUKUM	KARO UMUM	ASIS TEN	SEKDA
			

TABEL 5.1 (T.C-26)
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Tujuan RPD					Terwujudnya Clean and Good Government				
Sasaran RPD					Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan				
TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		
1	PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN	Indeks Kematangan Organisasi	1	Terwujudnya Percepatan Agenda Perubahan Reformasi Birokrasi melalui Peningkatan Tata Laksana Fasilitasi Kesra Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar	1	Peningkatan Kapasitas tata Laksana : Fasilitasi Kesra Pelayanan dasar dan Non Pelayanan Dasar	1	Peningkatan Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesra Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan	
			Nilai SAKIP OPD	2	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	Peningkatan Kualitas Koordinasi Pimpinan Daerah, Kerjasama, dan Kemitraan dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah	1	Pelaksanaan, Pembinaan, dan Fasilitasi Tugas Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerja sama daerah
		3		Terwujudnya Percepatan Agenda Perubahan Reformasi Birokrasi melalui Penataan Produk Hukum Daerah dan Penyelenggaraan Bantuan Hukum	1	Peningkatan kualitas tata kelola regulasi daerah untuk akuntabilitas pemerintahan	1	Penguatan sinergi dan koordinasi dengan Bapem Perda DPRD dan OPD dalam menyusun analisis kebutuhan perda	
							2	Peningkatan advokasi kepada OPD terkait tindak lanjut produk hukum	
							3	Peningkatan kapasitas SDM untuk perancangan produk hukum	
			4				Penguatan tim penyusun produk hukum		
5	Fasilitasi Pendampingan/advokasi kab/kota dalam perumusan produk hukum								
2	Peningkatan Bantuan Hukum Kepada Penyelenggara	1	Penguatan Pendampingan Terhadap LKBH KORPRI						

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA
			

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
						Pemerintah dan Bagi Masyarakat Miskin		2	Fasilitasi Pendampingan Bantuan Hukum Kepada Penyelenggara Pemerintah dan Keluarga Miskin
								3	Penguatan Kapasitas OBH terhadap Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin
								4	Penataan Lembaga, Penguatan Manajemen ASN, Pemnguatan Akuntabilitas Kinberja, Kuwalitas Perencanaan, Penata Usahaan Keuangan dan Pengawasan
				4	Terwujudnya Percepatan Agenda Perubahan Reformasi Birokrasi melalui Peningkatan Tata Laksana Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	1	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian, BUMD dan BLUD	1	Perumusan Kebijakan Ekonomi
								2	Peningkatan Koordinasi dan evaluasi Kebijakan Ekonomi
								3	Koordinasi dan evaluasi Penyehatan BUMD dan kebijakan pendirian BLUD
						2	Merumuskan Kebijakan Mengenai Pengendalian Administrasi Pembangunan Terintegrasi	1	Pengembangan Sistem Terintegrasi antara Emonep dan Siransija
								2	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan
								3	Peningkatan Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
						4	Pengelolaan kebijakan dan koordinasi administrasi pembangunan	4	Pengelolaan kebijakan dan koordinasi administrasi pembangunan
								5	Meningkatkan koordinasi antar stakeholder terkait pelaksanaan administrasi pembangunan
				5	Terwujudnya Percepatan Agenda Perubahan Reformasi	1	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pengadaan	1	Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM Pengelola PBJ

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA
			

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN			
				Birokrasi melalui Peningkatan Tata Laksana Pengadaan Barang dan Jasa		barang dan jasa pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan kompetitif serta sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan menitikberatkan pada pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya	2	Penguatan Strategi PBJ, Pelaksanaan PBJ, Monitoring dan evaluasi PBJ			
							3	Pelaksanaan pendampingan proses perencanaan, pelaksanaan dan hasil PBJ dalam rangka peningkatan kapasitas pelaku PBJ			
							4	Pelaksanaan coaching clinic dalam rangka peningkatan kapasitas pelaku PBJ, pembinaan dan advokasi PBJ			
							5	Meningkatkan integritas pelaku pengadaan untuk pencegahan penyimpangan dalam proses pengadaan barang/ jasa pemerintah			
							6	Pemantauan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi PBJ			
							7	Peningkatan Kesejahteraan dan Profesionalisme Pengelola Pengadaan			
							2	Meningkatkan kualitas tata kelola perencanaan, pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan terintegrasi			
										1	Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, monev dan kinerja perangkat daerah
										2	Pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah
										3	Pengelolaan administrasi umum perangkat daerah
										4	Peyediaan jasa penunjang perangkat daerah
				6	Terwujudnya Percepatan 8 Agenda Reformasi Birokrasi melalui Fasilitasi dan	8	1	Penguatan Pelaksanaan Area Perubahan RB yang sesuai dengan Biro Organisasi	1	Mendorong manajemen perubahan	
									2	Melaksanakan Penataan Organisasi	
									3	Melaksanakan fasilitasi Tatalaksana	

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA
			

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
					Pendampingan terhadap Perangkat Daerah			4	Mendorong Kualitas Pelayanan Publik
								5	Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
				7	Terwujudnya Percepatan Agenda Perubahan Reformasi Birokrasi melalui Peningkatan Tata Laksana Pelayanan Pimpinan	1	Peningkatan Kualitas Koordinasi dalam Pelayanan Pimpinan Daerah	1	Peningkatan Pelayanan Administrasi, Kerumahtanggaan, Komunikasi Pimpinan Daerah
								2	Pemanfaatan Sistem Informasi Keprotokoleran dan Administrasi Umum
								3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
						2	Peningkatan Kualitas Perencanaan Program dan Aset, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja serta Penatausahaan Laporan Keuangan dan Aset	1	Penguatan Analisis Kebutuhan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah
						3	Peningkatan Kapasitas SDM	1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
				8	Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	1	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran, Penatausahaan, Aset, Kearsipan, Data Sektoral dan Budaya Kerja Organisasi	1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
								2	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran
								3	Peningkatan Kualitas Penatausahaan Keuangan dan Aset
								4	Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa
								5	Peningkatan Kualitas Kearsipan dan Pengelolaan Data Sektoral
								6	Peningkatan Kualitas Budaya Kerja Organisasi, Penyusunan Peta Proses Bisnis dan SOP

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA
			

TABEL 5.2 (T.C-26)
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Tujuan RPD		Peningkatan Sumber Daya Manusia					
Sasaran RPD		Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan dan Pemajuan Kehidupan Beragama Berlandaskan Nilai Kebangsaan dan Kearifan Lokal					
TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
1	Peningkatan Pemajuan Nilai keagamaan sebagai Bagian Pembangunan Daerah	Indeks Kerukunan Beragama	1	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola dan Kualitas Sarana Prasarana Bina Mental Spiritual	1	Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan, Peningkatan kualitas Pendidikan Agama dan Sarana Prasarana Pusat Pembinaan Mental Spiritual	1 Pembinaan, Pengelolaan, Peningkatan Sarana Prasarana Peribadatan
							2 Peningkatan Kapasitas Individu dan Lembaga Pembinaan Spiritual
							3 Fasilitasi Studi Pendidikan Tinggi Islam dengan kriteria dan kompetensi tertentu

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.





Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur, pada Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo terdapat program yang merupakan kegiatan untuk belanja rutin dan program yang menjadi prioritas urusan wajib.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran program yang menjadi prioritas urusan wajib/Belanja Langsung pada Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo yang ditetapkan melalui kegiatan yang akan dilaksanakan.

Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo yang direncanakan untuk Periode Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

a. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

- 1. Program Kesejahteraan Rakyat, dengan kegiatan:
 - a. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar;
 - b. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar; dan
 - c. Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual.
- 2. Program pemerintahan dan Otonomi Daerah, dengan kegiatan:
 - a. Pelaksanaan Tugas Pemerintahan;
 - b. Pelaksanaan Otonomi Daerah; dan
 - c. Fasilitasi Kerjasama Daerah.
- 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan kegiatan:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluating Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - d. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; dan
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA
			

b. Biro Hukum

1. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, dengan kegiatan :
 - a. Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan
 - b. Fasilitasi Bantuan Hukum.
2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dengan kegiatan:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

c. Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan





1. Program Perekonomian dan Pembangunan, dengan kegiatan:
 - a. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian;
 - b. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam; dan
 - c. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD;
2. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan, dengan kegiatan:
 - a. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah; dan
 - b. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dengan kegiatan:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

d. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan kegiatan:
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah; dan
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, dengan kegiatan:
 - a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - c. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

e. Biro Organisasi

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan kegiatan:
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA
			





- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah; dan
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Penataan Organisasi, dengan kegiatan:
- a. Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan; dan
 - b. Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja.

f. Biro Umum dan Pos Pimpinan Setda

1. Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan kegiatan:
- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - h. Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan;
 - i. Fasilitasi Keprotokolan;
2. Adapun untuk pos anggaran Pimpinan Setda juga melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan kegiatan:
- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Khusus Gaji Pimpinan Setda);
 - b. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan
 - c. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah.

6.2 Indikator Kinerja Program, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif

Adapun indikator kinerja dan pendanaan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo sebagaimana dapat digambarkan dalam tabel T.C 2.7 berikut:

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA
			

Tabel 6.1 (T.C.27)
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi Kegiatan	
			2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
SKPD : SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO														
PAGU INDIKATIF SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO			Rp	109.947.607.471	Rp	116.374.287.082	Rp	123.707.964.481	Rp	135.970.427.429	Rp	487.340.672.477		
BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT														
I. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH		Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Tugas Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100%	100%	1.594.364.740	100%	1.753.801.214	100%	1.929.181.335	100%	7.047.802.099	100%	12.325.149.388	Provinsi Gorontalo/Lainnya
1	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Presentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	100%	100%	594.364.740	100%	653.801.214	100%	719.181.335	100%	1.855.044.006	100%	3.822.391.296	Provinsi Gorontalo/Lainnya
1	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan Paten	2 Dok	1 Dok	100.000.000	1 Dok	110.000.000	1 Dok	121.000.000	1 Dok	484.000.000	4 Dok	815.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
2	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penataan Wilayah	16 pilar	2 Dok	350.000.000	2 Dok	385.000.000	2 Dok	423.500.000	2 Dok	847.000.000	8 Dok	2.005.500.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
3	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum SPM	6 Dok	6 Dok	144.364.740	6 Dok	158.801.214	6 Dok	174.681.335	6 Dok	524.044.006	24 Dok	1.001.891.296	Provinsi Gorontalo/Lainnya
2	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Presentase Pelaksanaan Otonomi Daerah	100%	100%	650.000.000	100%	715.000.000	100%	786.500.000	100%	2.833.258.093	100%	4.984.758.093	Provinsi Gorontalo/Lainnya
1	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	50 Dok	6 Dok	250.000.000	6 Dok	275.000.000	6 Dok	302.500.000	6 Dok	897.258.093	24 Dok	1.724.758.093	Provinsi Gorontalo/Lainnya
2	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	1 laporan	1 Dok	200.000.000	1 Dok	220.000.000	1 Dok	242.000.000	1 Dok	968.000.000	4 Dok	1.630.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA
			



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi Kegiatan		
					2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	5 laporan	1 Lap	200.000.000	1 Lap	220.000.000	1 Dok	242.000.000	1 Dok	968.000.000	4 Dok	1.630.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya	
3	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Presentase Fasilitasi Kerjasama Daerah	100%	100%	350.000.000	100%	385.000.000	100%	423.500.000	100%	2.359.500.000	100%	3.518.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya	
1	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	5	5	150.000.000	5	165.000.000	5	181.500.000	5	907.500.000	20	1.404.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya	
2	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	N/A	3	100.000.000	3	110.000.000	3	121.000.000	3	726.000.000	12	1.057.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya	
3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	N/A	5	100.000.000	5	110.000.000	5	121.000.000	5	726.000.000	20	1.057.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya	
II. PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT		Peningkatan Layanan dan Fasilitasi Pelayanan Dasar, Non Pelayanan Dasar dan Pembinaan Mental Spiritual	100%	100%	17.572.582.115	100%	19.341.840.100	100%	21.290.423.838	100%	23.436.745.895	100%	81.641.591.948	Provinsi Gorontalo/Lainnya	
4	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	100%	100%	9.082.594.008	100%	9.990.853.409	100%	10.989.938.750	100%	12.088.932.625	100%	42.152.318.792	Provinsi Gorontalo/Lainnya	
1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	N/A	1	914.262.500	1	959.975.625	1	1.007.974.406	1	1.058.373.127	4	3.940.585.658	Provinsi Gorontalo/Lainnya	
2	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	457	150	8.168.331.508	150	9.030.877.784	150	9.981.964.344	150	11.030.559.498	600	38.211.733.134	Provinsi Gorontalo/Lainnya	
5	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Presentase Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	100%	100%	8.369.990.375	100%	9.206.989.413	100%	10.127.688.354	100%	11.140.457.189	100%	38.845.125.330	Provinsi Gorontalo/Lainnya	

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA
			



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi Kegiatan		
					2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan Kesehatan dan Sosial	1 Dok	800 Dok	8.369.990.375	800 Dok	9.206.989.413	800 Dok	10.127.688.354	800 Dok	11.140.457.189	3200 Dok	38.845.125.330	Provinsi Gorontalo/Lainnya
6		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Presentase Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	100%	100%	119.997.732	100%	143.997.278	100%	172.796.734	100%	207.356.081	100%	644.147.825	Provinsi Gorontalo/Lainnya
1		Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	1 Dok	1 Dok	119.997.732	1 Dok	143.997.278	1 Dok	172.796.734	1 Dok	207.356.081	4 Dok	644.147.825	Provinsi Gorontalo/Lainnya

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA
			

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi Kegiatan		
					2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
III. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Peningkatan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	100%	6.382.790.545	100%	7.021.069.600	100%	8.495.494.215	100%	9.345.043.637	100%	32.584.784.011	Provinsi Gorontalo/Lainnya
7	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluating Kinerja Perangkat Daerah		Presentase kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluating Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	214.290.037	100%	235.719.041	100%	285.220.039	100%	313.742.043	100%	1.048.971.160	Provinsi Gorontalo/Lainnya
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	30 Dok	6 Dok	214.290.037	6 Dok	235.719.041	6 Dok	285.220.039	6 Dok	313.742.043	24 Dok	1.048.971.160	Provinsi Gorontalo/Lainnya
8	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	160.022.000	100%	176.024.200	100%	212.989.282	100%	234.288.210	100%	783.323.692	Provinsi Gorontalo/Lainnya
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55 org	15 Org	160.022.000	15 Org	176.024.200	15 Org	212.989.282	15 Org	234.288.210	60 Org	783.323.692	Provinsi Gorontalo/Lainnya
9	Administrtasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	433.171.628	100%	476.488.791	100%	576.551.437	100%	634.206.581	100%	2.120.418.436	Provinsi Gorontalo/Lainnya
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4 Paket	433.171.628	4 Paket	476.488.791	4 Paket	576.551.437	4 Paket	634.206.581	16 Paket	2.120.418.436	Provinsi Gorontalo/Lainnya
10	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	5.129.464.869	100%	5.642.411.356	100%	6.827.317.741	100%	7.510.049.515	100%	25.109.243.480	Provinsi Gorontalo/Lainnya
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Org	33 Org	5.129.464.869	33 Org	5.642.411.356	33 Org	6.827.317.741	33 Org	7.510.049.515	132 Org	25.109.243.480	Provinsi Gorontalo/Lainnya
11	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	445.842.011	100%	490.426.212	100%	593.415.717	100%	652.757.288	100%	2.182.441.228	Provinsi Gorontalo/Lainnya

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA
			





Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi Kegiatan	
					2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediaka	2 laporan	1 Lap	445.842.011	1 Lap	490.426.212	1 Lap	593.415.717	1 Lap	652.757.288	4 Lap	2.182.441.228	Provinsi Gorontalo/Lainnya
TOTAL PAGU INDIKATIF BIRO PEMKESRA					25.549.737.400		28.116.710.913		31.715.099.389		39.829.591.631		126.551.525.347		
BIRO HUKUM															
I. PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM			Persentase Produk Hukum Daerah yang disusun dan Pendampingan Kasus Terkait Penyelenggara Pemerintah dan Bantuan Bagi Masyarakat Miskin	100%	100%	4.050.000.000	100%	4.050.000.000	100%	4.050.000.000	100%	4.050.000.000	100%	16.200.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
1	Fasilitasi Penyusunan Perundang-perundangan		Persentase Produk Hukum Daerah yang disusun dan disosialisasikan	100%	100%	1.800.000.000	100%	1.800.000.000	100%	1.800.000.000	100%	1.800.000.000	100%	7.200.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan		Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang disusun	10 Perda /50 Pergub	60 Dok	250.000.000	60 Dok	250.000.000	60 Dok	250.000.000	60 Dok	250.000.000	240 Dok	1.000.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
2	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Penetapan		Jumlah Produk Hukum Penetapan yang disusun	300 Pergub/SK	350 Dok	200.000.000	350 Dok	200.000.000	350 Dok	200.000.000	350 Dok	200.000.000	1400 Dok	800.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya		Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	310 Dokumen	410 Dok	600.000.000	410 Dok	600.000.000	410 Dok	600.000.000	410 Dok	600.000.000	1640 Dok	2.400.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
4	Fasilitas dan Evaluasi Produk Hukum Kab/Kota		Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	6 Dokumen	60 Dok	750.000.000	60 Dok	750.000.000	60 Dok	750.000.000	60 Dok	750.000.000	240 Dok	3.000.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
2	Fasilitasi Bantuan Hukum		Pesentase Pendampingan Kasus Terkait Penyelenggara Pemerintah dan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin	100%	100%	2.250.000.000	100%	2.250.000.000	100%	2.250.000.000	100%	2.250.000.000	100%	9.000.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA
			

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi Kegiatan		
					2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum		Jumlah Masalah Hukum yang diselesaikan	6 laporan	6 Laporan Kasus	1.500.000.000	6 Laporan Kasus	1.500.000.000	6 Laporan Kasus	1.500.000.000	6 Laporan Kasus	1.500.000.000	24 Laporan Kasus	6.000.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
2	Fasilitasi Penyelesaian masalah Non Litigasi dan HAM		Jumlah masalah hukum Non Litigasi dan HAM yang diselesaikan	6 laporan	24 Laporan Kasus	750.000.000	24 Laporan Kasus	750.000.000	24 Laporan Kasus	750.000.000	24 Laporan Kasus	750.000.000	96 Laporan Kasus	3.000.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
II. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan	100%	100%	5.030.000.000	100%	5.330.000.000	100%	5.010.000.000	100%	5.010.000.000	100%	20.380.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluating Kinerja Perangkat Daerah		Presentase kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluating Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	1.400.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	4 Dok	2 Dok	150.000.000	2 Dok	150.000.000	2 Dok	150.000.000	2 Dok	150.000.000	8 Dok	600.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Penyusunan RKA SKPD yang disusun	2 Dok	2 Dok	100.000.000	2 Dok	100.000.000	2 Dok	100.000.000	2 Dok	100.000.000	8 Dok	400.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lap	4 Lap	100.000.000	4 Lap	100.000.000	4 Lap	100.000.000	4 Lap	100.000.000	16 Lap	400.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	600.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan	36 org	36 Org	30.000.000	36 Org	30.000.000	36 Org	30.000.000	36 Org	30.000.000	144 Org	120.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 org	10 Org	120.000.000	10 Org	120.000.000	10 Org	120.000.000	10 Org	120.000.000	40 Org	480.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA
			

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Lokasi Kegiatan
			2023			2024			2025			2026			
			Target	Rp.		Target	Rp.		Target	Rp.		Target	Rp.		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	1.000.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	30.000.000	1 Paket	30.000.000	1 Paket	30.000.000	1 Paket	30.000.000	4 Paket	120.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya		
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 Lap	220.000.000	1 Lap	220.000.000	1 Lap	220.000.000	1 Lap	220.000.000	4 Lap	880.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya		
4	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	3.820.000.000	100%	3.800.000.000	100%	3.800.000.000	100%	3.800.000.000	100%	15.220.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25 Org/Bln	25 Org/Bln	3.700.000.000	25 Org/Bln	3.700.000.000	25 Org/Bln	3.700.000.000	25 Org/Bln	3.700.000.000	100 Org/Bln	14.800.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya		
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 laporan	1 Lap	120.000.000	1 Lap	100.000.000	1 Lap	100.000.000	1 Lap	100.000.000	4 Lap	420.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya		
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100.000.000	100%	420.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	720.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya		
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	4 Unit	100.000.000	4 Unit	100.000.000	4 Unit	100.000.000	4 Unit	100.000.000	16 Unit	400.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya		
2	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	1 Unit	320.000.000	-	-	-	-	1 Unit	320.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya		

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA
			

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi Kegiatan		
					2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tersedianya Layanan dan Manajemen Administrasi Perkantoran	100%	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	1.440.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
1	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 Lap	150.000.000	1 Lap	150.000.000	1 Lap	150.000.000	1 Lap	150.000.000	4 Lap	600.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 Lap	100.000.000	1 Lap	100.000.000	1 Lap	100.000.000	1 Lap	100.000.000	4 Lap	400.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tersedianya Layanan dan Manajemen Administrasi Perkantoran	100%	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	440.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 laporan	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	4	320.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 laporan	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	4	120.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
TOTAL PAGU INDIKATIF BIRO HUKUM						9.080.000.000		9.380.000.000		9.060.000.000		9.060.000.000		36.580.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA
			

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi Kegiatan	
			2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
BIRO PENGENDALIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN														
I. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Persentase Peningkatan Aktivitas Pengendalian Ekonomi	100%	100%	491.341.813	100%	491.341.813	100%	491.341.813	100%	491.341.813	100%	1.965.367.252	Provinsi Gorontalo/Lainnya
1	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro dan Mikro	5 Kegiatan	23 Dok	251.000.013	30 Dok	251.000.013	30 Dok	251.000.013	30 Dok	251.000.013	113 Dok	1.004.000.052	Provinsi Gorontalo/Lainnya
1	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	N/A	11 Dok	166.021.000	15 Dok	166.021.000	15 Dok	166.021.000	15 Dok	166.021.000	56 Dok	664.084.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
2	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang disusun	5 Kegiatan	12 Dok	84.979.013	15 Dok	84.979.013	15 Dok	84.979.013	15 Dok	84.979.013	57 Dok	339.916.052	Provinsi Gorontalo/Lainnya
2	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	N/A	15 Dok	60.241.700	15 Dok	60.241.700	15 Dok	60.241.700	15 Dok	60.241.700	60 Dok	240.966.800	Provinsi Gorontalo/Lainnya
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	N/A	15 Dok	60.241.700	15 Dok	60.241.700	15 Dok	60.241.700	15 Dok	60.241.700	60 Dok	240.966.800	Provinsi Gorontalo/Lainnya
3	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan, Aneka Usaha dan Pendirian BLUD	N/A	12	180.100.100	12	180.100.100	12	180.100.100	12	180.100.100	48	720.400.400	Provinsi Gorontalo/Lainnya

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA
			

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi Kegiatan		
					2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	N/A	12	119.198.350	12	119.198.350	12	119.198.350	12	119.198.350	48 Dok	476.793.400	Provinsi Gorontalo/Lainnya
2		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	N/A	12 Dok	60.901.750	12 Dok	60.901.750	12 Dok	60.901.750	12 Dok	60.901.750	48 Dok	243.607.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
II. PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			Jumlah Dokumen Pengendalian Pembangunan Dana APBD, APBN Provinsi dan Kabupaten/Kota	8 Kegiatan	3 Dok	618.722.414	3 Dok	618.722.414	3 Dok	618.722.414	3 Dok	618.722.414	12 Dok	2.474.889.656	Provinsi Gorontalo/Lainnya
4		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD, APBN, dan Wilayah	8 Kegiatan	33 Lap	578.522.312	33 Lap	578.522.312	33 Lap	578.522.312	33 Lap	578.522.312	132 Lap	2.314.089.248	Provinsi Gorontalo/Lainnya
1		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	4 Kegiatan	17 Lap	435.081.712	17 Lap	435.081.712	17 Lap	435.081.712	17 Lap	435.081.712	68 Lap	1.740.326.848	Provinsi Gorontalo/Lainnya
2		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	N/A	8 Lap	57.598.800	8 Lap	57.598.800	8 Lap	57.598.800	8 Lap	57.598.800	32 Lap	230.395.200	Provinsi Gorontalo/Lainnya
3		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	4 Kegiatan	8 Lap	85.841.800	8 Lap	85.841.800	8 Lap	85.841.800	8 Lap	85.841.800	32 Lap	343.367.200	Provinsi Gorontalo/Lainnya

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA
			




Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi Kegiatan		
					2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	N/A	16 Dok	40.200.102	16 Dok	40.200.102	16 Dok	40.200.102	16 Dok	40.200.102	64 Dok	160.800.408	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	1	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	N/A	16 Dok	40.200.102	16 Dok	40.200.102	16 Dok	40.200.102	16 Dok	40.200.102	64 Dok	160.800.408	Provinsi Gorontalo/Lainnya
III. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan	100%	100%	4.853.866.028	100%	4.853.866.028	100%	4.853.866.028	100%	4.853.866.028	100%	19.415.464.112	Provinsi Gorontalo/Lainnya
6	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen dan Laporan Evaluasi Hasil Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	100%	100%	153.398.568	100%	387.369.648	100%	340.231.025	100%	387.369.648	100%	1.268.368.889	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dok	8 Dok	140.398.568	8 Dok	318.369.648	8 Dok	271.231.025	8 Dok	318.369.648	32 Dok	1.048.368.889	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dok	2 Dok	5.000.000	2 Dok	15.000.000	2 Dok	15.000.000	2 Dok	15.000.000	8 Dok	50.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Lap	4 Dok	8.000.000	4 Dok	54.000.000	4 Dok	54.000.000	4 Dok	54.000.000	16 Dok	170.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
7	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan dan Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%	100%	50.000.000	100%	87.225.500	100%	87.225.500	100%	87.225.500	100%	311.676.500	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan	N/A	1 Paket	25.000.000	1 Paket	52.225.500	1 Paket	52.225.500	1 Paket	62.225.500	4 Paket	191.676.500	Provinsi Gorontalo/Lainnya

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA
			

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi Kegiatan		
					2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	19 Org	15 Org	25.000.000	16 Org	35.000.000	16 Org	35.000.000	16 Org	25.000.000	63 Org	120.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
8	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyelenggaraan Rapat SKPD, dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100%	100%	107.975.000	100%	145.860.000	100%	145.253.250	100%	145.860.000	100%	544.948.250	Provinsi Gorontalo/Lainnya
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	1 Paket	5.615.000	1 Paket	22.500.000	1 Paket	21.893.250	1 Paket	22.500.000	4 Paket	72.508.250	Provinsi Gorontalo/Lainnya
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	15 Lap	54.360.000	15 Lap	74.360.000	15 Lap	74.360.000	15 Lap	74.360.000	60 Lap	277.440.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
3	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	N/A	2 Dok	48.000.000	2 Dok	49.000.000	2 Dok	49.000.000	2 Dok	49.000.000	8 Dok	195.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
9	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dan Laporan Keuangan SKPD	100%	100%	3.622.298.500	100%	3.704.298.480	100%	3.704.298.480	100%	3.704.298.480	100%	14.735.193.940	Provinsi Gorontalo/Lainnya
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	N/A	28 Org	3.612.298.500	28 Org	3.689.298.480	28 Org	3.689.298.480	28 Org	3.689.298.480	112 Org	14.680.193.940	Provinsi Gorontalo/Lainnya
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan	N/A	6 Lap	10.000.000	6 Lap	15.000.000	6 Lap	15.000.000	6 Lap	15.000.000	24 Lap	55.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA
			


Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi Kegiatan		
					2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional serta Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	N/A	7 Unit	565.950.000	7 Unit	109.740.000	6 Unit	178.485.373	7 Unit	109.740.000	27 Unit	963.915.373	Provinsi Gorontalo/Lainnya
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	1 Unit	545.000.000	-	-	-	-	-	-	1 Unit	545.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	N/A	-	-	1 Unit	54.000.000	-	-	1 Unit	54.000.000	2 Unit	108.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	N/A	6 Unit	20.950.000	6 Unit	55.740.000	6 Unit	178.485.373	6 Unit	55.740.000	24 Unit	310.915.373	Provinsi Gorontalo/Lainnya
11	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Jasa yang Disediakan	100%	2 Lap	313.508.960	2 Lap	361.067.400	2 Lap	350.067.400	2 Lap	361.067.400	8 Lap	1.385.711.160	Provinsi Gorontalo/Lainnya
1	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	1 Lap	52.808.960	1 Lap	100.367.400	1 Lap	89.367.400	1 Lap	100.367.400	4 Lap	342.911.160	Provinsi Gorontalo/Lainnya
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	N/A	1 Lap	260.700.000	1 Lap	260.700.000	1 Lap	260.700.000	1 Lap	260.700.000	4 Lap	1.042.800.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
12	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional yang Dipelihara serta Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	25 Unit	40.735.000	25 Unit	58.305.000	25 Unit	48.305.000	25 Unit	58.305.000	100 Unit	205.650.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA
			

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi Kegiatan	
					2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	N/A	3 Unit	22,125,000	3 Unit	22,125,000	3 Unit	22,125,000	3 Unit	22,125,000	12 Unit	88,500,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
2		Penyediaan Jasa Pemerlihaaraan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	N/A	7 Unit	6,000,000	7 Unit	10,000,000	7 Unit	10,000,000	7 Unit	10,000,000	28 Unit	36,000,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
3		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	N/A	15 Unit	12,610,000	15 Unit	26,180,000	15 Unit	16,180,000	15 Unit	26,180,000	60 Unit	81,150,000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
TOTAL PAGU INDIKATIF BIRO PENGENDALIAN EKBANG						5,963,930,255		5,963,930,255		5,963,930,255		5,963,930,255		23,855,721,020	
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA															
I. PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			Jumlah Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Gorontalo	N/A	1 Dok	975,673,826	1 Dok	975,673,826	1 Dok	975,673,826	1 Dok	975,673,826	4 Dok	3,902,695,304	Provinsi Gorontalo/Lainnya
1		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengelolaan PBJ	100%	100%	573,219,831	100%	573,219,831	100%	573,219,831	100%	573,219,831	100%	2,292,879,324	Provinsi Gorontalo/Lainnya
1		Pengelolaan strategi PBJ	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	4 Lap	60,202,100	4 Lap	60,202,100	4 Lap	60,202,100	4 Lap	60,202,100	16 Lap	240,808,400	Provinsi Gorontalo/Lainnya
2		Pelaksanaan PBJ	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	4 Lap	386,851,245	4 Lap	386,851,245	4 Lap	386,851,245	4 Lap	386,851,245	16 Lap	1,547,404,980	Provinsi Gorontalo/Lainnya
3		Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	12 Lap	126,166,486	12 Lap	126,166,486	12 Lap	126,166,486	12 Lap	126,166,486	48 Lap	504,665,944	Provinsi Gorontalo/Lainnya

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA
			





Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Lokasi Kegiatan	
					2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		Persentase Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	100%	100%	161.807.393	100%	161.807.393	100%	161.807.393	100%	161.807.393	100%	647.229.572	Provinsi Gorontalo/Lainnya
1	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik		Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Laporan	1 Lap	64.285.962	1 Lap	64.285.962	1 Lap	64.285.962	1 Lap	64.285.962	4 Lap	257.143.848	Provinsi Gorontalo/Lainnya
2	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	1 Lap	69.793.000	1 Lap	69.793.000	1 Lap	69.793.000	1 Lap	69.793.000	4 Lap	279.172.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
3	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	1 Lap	27.728.431	1 Lap	27.728.431	1 Lap	27.728.431	1 Lap	27.728.431	4 Lap	110.913.724	Provinsi Gorontalo/Lainnya
3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Persentase Pembinaan dan Advokasi PBJ	100%	100%	240.646.602	100%	240.646.602	100%	240.646.602	100%	240.646.602	100%	962.586.408	Provinsi Gorontalo/Lainnya
1	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	30 Orang	30 Org	61.054.544	30 Org	61.054.544	30 Org	61.054.544	30 Org	61.054.544	120 Org	244.218.176	Provinsi Gorontalo/Lainnya
2	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	1 Dok	113.705.913	1 Dok	113.705.913	1 Dok	113.705.913	1 Dok	113.705.913	4 Dok	454.823.652	Provinsi Gorontalo/Lainnya
3	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	1 Dok	65.886.145	1 Dok	65.886.145	1 Dok	65.886.145	1 Dok	65.886.145	4 Dok	263.544.580	Provinsi Gorontalo/Lainnya

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA
			





Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi Kegiatan		
					2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan	100%	100%	4.311.473.342	100%	4.311.473.342	100%	4.311.473.342	100%	4.311.473.342	100%	17.245.893.368	Provinsi Gorontalo/Lainnya
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dok	8 Dok	87.666.000	8 Dok	87.666.000	8 Dok	87.666.000	8 Dok	87.666.000	32 Dok	350.664.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	8 Dok	8 Dok	87.666.000	8 Dok	87.666.000	8 Dok	87.666.000	8 Dok	87.666.000	32 Dok	350.664.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Saprasi dan Prasarana Pendukung	100%	100%	66.150.000	100%	66.150.000	100%	66.150.000	100%	66.150.000	100%	264.600.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	66.150.000	1 Paket	66.150.000	1 Paket	66.150.000	1 Paket	66.150.000	4 Paket	264.600.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	3.635.998.895	100%	3.635.998.895	100%	3.635.998.895	100%	3.635.998.895	100%	14.543.995.580	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Org	32 Org	3.635.998.895	32 Org	3.635.998.895	35 Org	3.635.998.895	35 Org	3.635.998.895	134 Org	14.543.995.580	Provinsi Gorontalo/Lainnya
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Peningkatan Pelayanan Jasa Perkantoran	100%	100%	521.658.447	100%	521.658.447	100%	521.658.447	100%	521.658.447	100%	2.086.633.788	Provinsi Gorontalo/Lainnya
	1	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 Lap	521.658.447	1 Lap	521.658.447	1 Lap	521.658.447	1 Lap	521.658.447	4 Lap	2.086.633.788	Provinsi Gorontalo/Lainnya
TOTAL PAGU INDIKATOF BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA						5.287.147.168		5.287.147.168		5.287.147.168		5.287.147.168		21.148.588.672	Provinsi Gorontalo/Lainnya

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA
			

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi Kegiatan		
					2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
BIRO ORGANISASI															
I. PROGRAM PENATAAN ORGANISASI			Terlaksananya Penataan Organisasi Provinsi dan Pembinaan Kabupaten/Kota	100%	38%	2.725.000.000	72%	2.375.000.000	100%	2.025.000.000	100%	1.750.000.000	100%	8.875.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
1	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Terlaksananya Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	N/A	12 OPD 6 Kab/Kota	900.000.000	12 OPD 6 Kab/Kota	900.000.000	8 OPD 6 Kab/Kota	750.000.000	12 OPD 6 Kab/Kota	650.000.000	44 OPD 6 Kab/Kota	3.200.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
1	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi	Dokumen	12 Dok. OPD	350.000.000	12 Dok. OPD	350.000.000	8 Dok OPD	300.000.000	12 Dok OPD	250.000.000	44 Dok OPD	1.250.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya	
2	Fasilitasi Penataan Kelembagaan, Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Dokumen	6 Dok Kab/Kota	200.000.000	6 Dok Kab/Kota	200.000.000	6 Dok Kab/Kota	175.000.000	6 Dok Kab/Kota	150.000.000	24 Dok Kab/Kota	725.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya	
3	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	Dokumen	12 Dok. Anjab, ABK, Evjab	350.000.000	12 Dok. Anjab, ABK, Evjab	350.000.000	8 Dok Anjab, ABK, Evjab	275.000.000	12 Dok Anjab, ABK, Avjab	250.000.000	44 Dok Anjab, ABK, Evjab	1.225.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya	
2	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja		Terlaksananya Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	-	12 OPD 6 Kab/Kota	1.825.000.000	12 OPD 6 Kab/Kota	1.475.000.000	8 OPD 6 Kab/Kota	1.275.000.000	12 OPD 6 Kab/Kota	1.100.000.000	44 OPD 6 Kab/Kota	5.675.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
1	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dokumen	33 Dok (1 PMPRB Pemda, 32 PMPRB OPD)	250.000.000	33 Dok (1 PMPRB Pemda, 32 PMPRB OPD)	250.000.000	33 Dok (1 PMPRB Pemda, 32 PMPRB OPD)	200.000.000	33 Dok (1 PMPRB Pemda, 32 PMPRB OPD)	200.000.000	132 Dok	900.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya	

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA
			

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi Kegiatan		
					2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Monitoring & Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Dokumen	34 Dok (1 Dokumen PK Pemda, 1 Dokumen LKIP Pemda, 32 Dokumen SAKIP OPD)	350.000.000	34 Dok (1 Dokumen PK Pemda, 1 Dokumen LKIP Pemda, 32 Dokumen SAKIP OPD)	350.000.000	34 Dok (1 Dokumen PK Pemda, 1 Dokumen LKIP Pemda, 32 Dokumen SAKIP OPD)	300.000.000	34 Dok (1 Dokumen PK Pemda, 1 Dokumen LKIP Pemda, 32 Dokumen SAKIP OPD)	275.000.000	136 Dok (4 Dok PK Pemda, 4 Dok LKIP Pemda dan 128 Dok. SAKIP OPD)	1.275.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
3	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Dokumen	2 Dok (1 Dok Evaluasi Budaya Kerja dan 1 Dok Penguatan dan Internalisasi Budaya Kerja	500.000.000	1 Dok Evaluasi Budaya Kerja	150.000.000	1 Dok Evaluasi Budaya Kerja	100.000.000	1 Dok Evaluasi Budaya Kerja	100.000.000	5 Dok (4 Dok Evaluasi Budaya Kerja dan 1 Dok Penguatan dan Internalisasi Budaya Kerja	850.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
4	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Dokumen	25 Dok (1 Dok Probis Pemda, 12 Probis OPD, 12 Dok SOP OPD	350.000.000	25 Dok (1 Dok Probis Pemda, 12 Probis OPD, 12 Dok SOP OPD	350.000.000	21 Dok (1 Dok Probis OPD, 8 Dok Probis OPD, 12 Dok SOP OPD	325.000.000	65 Dok (1 Probis Pemda, 32 Probis OPD, 32 Dok SOP OPD	250.000.000	136 Dok (4 Dok Probis Pemda, 64 Dok Probis OPD, 68 Dok Probis OPD	1.275.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
5	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Dokumen	29 Dok (12 Dok SP, 5 Dok IPP, 12 Dok IKM)	375.000.000	29 Dok (12 Dok SP, 5 Dok IPP, 12 Dok IKM)	375.000.000	21 Dok (8 Dok SP, 5 Dok IPP, 8 Dok IKM)	350.000.000	69 Dok (32 Dok SP, 5 Dok IPP, 32 Dok IKM)	275.000.000	148 Dok (64 Dok SP, 21 Dok IPP dan 64 Dok IKM)	1.375.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
II. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan	100%	100%	5.650.000.000	100%	5.600.000.000	100%	5.750.000.000	100%	5.600.000.000	100%	22.600.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA
			





Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi Kegiatan		
					2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen, 8 Laporan	7 Dok, 8 Lap	500.000.000	5 Dok, 8 Lap	450.000.000	5 Dok, 8 Lap	500.000.000	5 Dok, 8 Lap	500.000.000	22 Dok, 32 Lap	1.950.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	7 Dokumen	7 Dok	350.000.000	5 Dok	300.000.000	5 Dok	350.000.000	5 Dok	350.000.000	22 Dok	1.350.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	8 Lap	150.000.000	8 Lap	150.000.000	8 Lap	150.000.000	8 Lap	150.000.000	32 Lap	600.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Paket dan Laporan	Paket	3 Paket, 12 Lap	950.000.000	3 Paket, 12 Lap	750.000.000	3 Paket, 12 Lap	650.000.000	3 Paket, 12 Lap	500.000.000	3 Paket, 12 Lap	2.850.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3 Paket	750.000.000	3 Paket	500.000.000	3 Paket	400.000.000	3 Paket	250.000.000	12 Paket	1.900.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12 Lap	200.000.000	12 Lap	250.000.000	12 Lap	250.000.000	12 Lap	250.000.000	48 Lap	950.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah ASN yang ditingkatkan Kompetensinya	Orang	12 Org	350.000.000	12 Org	350.000.000	12 Org	350.000.000	12 Org	350.000.000	48 Org	1.400.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	12 Org	350.000.000	12 Org	350.000.000	12 Org	350.000.000	12 Org	350.000.000	48 Org	1.400.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	Dokumen	26 Org, 12 Lap	3.550.000.000	30 Org, 12 Lap	3.750.000.000	32 Org, 12 Lap	3.950.000.000	32 Org, 12 Lap	3.950.000.000	104 Org, 48 Lap	15.200.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Org	26 Org	3.400.000.000	30 Org	3.600.000.000	32 Org	3.800.000.000	32 Org	3.800.000.000	120 Org	14.600.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA
			

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi Kegiatan	
					2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	12 Lap	150.000.000	12 Lap	150.000.000	12 Lap	150.000.000	12 Lap	150.000.000	48 Lap	600.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	6 Lap	300.000.000	6 Lap	300.000.000	6 Lap	300.000.000	6 Lap	300.000.000	24 Lap	1.200.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
1	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	6 Lap	300.000.000	6 Lap	300.000.000	6 Lap	300.000.000	6 Lap	300.000.000	24 Lap	1.200.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
TOTAL PAGU INDIKATIF BIRO ORGANISASI						8.375.000.000		7.975.000.000		7.775.000.000		7.350.000.000		31.475.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
BIRO UMUM															
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Persentase pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Gorontalo	100%	100%	19.047.642.082	100%	20.476.215.238	100%	22.011.931.381	100%	23.662.826.235	100%	85.198.614.936	Provinsi Gorontalo/Lainnya
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	100%	130.144.227	100%	139.905.044	100%	150.397.922	100%	161.677.767	100%	582.124.960	Provinsi Gorontalo/Lainnya
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	8 Dok	8 Dok	112.349.718	8 Dok	120.775.947	8 Dok	129.834.143	8 Dok	139.571.704	32 Dok	502.531.511	Provinsi Gorontalo/Lainnya
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3 Lap	17.794.509	3 Lap	19.129.097	3 Lap	20.563.779	3 Lap	22.106.063	12 Lap	79.593.449	Provinsi Gorontalo/Lainnya
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	8.727.795.464	100%	9.382.380.124	100%	10.086.058.633	100%	10.842.513.031	100%	39.038.747.251	Provinsi Gorontalo/Lainnya

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA
			



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi Kegiatan		
					2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang	75 Org	8.613.908.197	80 Org	9.259.951.312	85 Org	9.954.447.660	90 Org	10.701.031.235	330 Org	38.529.338.404	Provinsi Gorontalo/Lainnya
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Lap	1 Lap	113.887.267	1 Lap	122.428.812	1 Lap	131.610.973	1 Lap	141.481.796	4 Lap	509.408.848	Provinsi Gorontalo/Lainnya
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah	100%	100%	216.734.116	100%	232.989.175	100%	250.463.363	100%	269.248.115	100%	969.434.769	Provinsi Gorontalo/Lainnya
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan BMD	1 Dok	1 Dok	50.000.000	1 Dok	53.750.000	1 Dok	57.781.250	1 Dok	62.114.844	4 Dok	223.646.094	Provinsi Gorontalo/Lainnya
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap	1 Dok	166.734.116	1 Dok	179.239.175	1 Dok	192.682.113	1 Dok	207.133.271	4 Dok	745.788.675	Provinsi Gorontalo/Lainnya
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	179.748.000	100%	193.229.100	100%	207.721.283	100%	223.300.379	100%	803.998.761	Provinsi Gorontalo/Lainnya
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	20 Org	179.748.000	20 Org	193.229.100	20 Org	207.721.283	20 Org	223.300.379	80 Org	803.998.761	Provinsi Gorontalo/Lainnya
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	2.266.214.827	100%	2.436.180.939	100%	2.618.894.509	100%	2.815.311.598	100%	10.136.601.873	Provinsi Gorontalo/Lainnya
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	20 Paket	2.266.214.827	21 Paket	2.436.180.939	22 Paket	2.618.894.509	23 Paket	2.815.311.598	86 Paket	10.136.601.873	Provinsi Gorontalo/Lainnya

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA
			

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi Kegiatan		
					2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang	100%	100%	2.063.707.127	100%	2.218.485.162	100%	2.384.871.549	100%	2.563.736.915	100%	9.230.800.752	Provinsi Gorontalo/Lainnya
1	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	2.063.707.127	1 Lap	2.218.485.162	1 Lap	2.384.871.549	1 Lap	2.563.736.915	4 Lap	9.230.800.752	Provinsi Gorontalo/Lainnya
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	4.151.811.746	100%	4.463.197.627	100%	4.797.937.449	100%	5.157.782.758	100%	18.570.729.580	Provinsi Gorontalo/Lainnya
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	22 Unit	22 Unit	948.933.200	22 Unit	1.020.103.190	22 Unit	1.096.610.929	22 Unit	1.178.856.749	88 Unit	4.244.504.068	Provinsi Gorontalo/Lainnya
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	8 Unit	8 Unit	3.202.878.546	8 Unit	3.443.094.437	8 Unit	3.701.326.520	8 Unit	3.978.926.009	32 Unit	14.326.225.511	Provinsi Gorontalo/Lainnya
8	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan		Persentase Pelayanan Materi dan Komunikasi Pimpinan	100%	100%	50.000.000	100%	53.750.000	100%	57.781.250	100%	62.114.844	100%	223.646.094	Provinsi Gorontalo/Lainnya
1	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	N/A	1 Lap	50.000.000	1 Lap	53.750.000	1 Lap	57.781.250	1 Lap	62.114.844	4 Lap	223.646.094	Provinsi Gorontalo/Lainnya
9	Fasilitasi Keprotokolan		Persentase Pelayanan Keprotokolan yang dilaksanakan	100%	100%	1.261.486.575	100%	1.356.098.068	100%	1.457.805.423	100%	1.567.140.830	100%	5.642.530.896	Provinsi Gorontalo/Lainnya
1	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	N/A	1 Lap	454.776.560	1 Lap	488.884.802	1 Lap	525.551.162	1 Lap	564.967.499	4 Lap	2.034.180.023	Provinsi Gorontalo/Lainnya

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA
			

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi Kegiatan	
					2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2		Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	N/A	1 Lap	494.660.000	1 Lap	531.759.500	1 Lap	571.641.463	1 Lap	614.514.572	4 Lap	2.212.575.535	Provinsi Gorontalo/Lainnya
2		Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	N/A	1 Lap	312.050.015	1 Lap	335.453.766	1 Lap	360.612.799	1 Lap	387.658.758	4 Lap	1.395.775.338	Provinsi Gorontalo/Lainnya
TOTAL PAGU INDIKATIF BIRO UMUM						19.047.642.082		20.476.215.238		22.011.931.381		23.662.826.235		85.198.614.936	
POS PIMPINAN SETDA															
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Persentase pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Gorontalo	100%	100%	36.644.150.566	100%	39.175.283.507	100%	41.894.856.288	100%	44.816.932.141	100%	162.531.222.502	Provinsi Gorontalo/Lainnya
1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	2.200.000.000	100%	2.200.000.000	100%	2.200.000.000	100%	2.200.000.000	100%	8.800.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7 Orang	7 Org	2.200.000.000	7 Org	2.200.000.000	7 Org	2.200.000.000	7 Org	2.200.000.000	28 Org	8.800.000.000	Provinsi Gorontalo/Lainnya
2		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah	100%	100%	1.695.881.028	100%	1.764.491.254	100%	1.836.531.991	100%	1.912.174.765	100%	7.209.079.038	Provinsi Gorontalo/Lainnya
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	2 Org	323.676.510	2 Org	323.676.510	2 Org	323.676.510	2 Org	323.676.510	2 Org	1.294.706.040	Provinsi Gorontalo/Lainnya
2		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	2 Org	75.000.000	2 Org	78.750.000	2 Org	82.687.500	2 Org	86.821.875	2 Org	323.259.375	Provinsi Gorontalo/Lainnya

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA
			

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi Kegiatan	
					2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	1 Paket	181.100.000	1 Paket	190.155.000	1 Paket	199.662.750	1 Paket	209.645.888	4 Paket	780.563.638	Provinsi Gorontalo/Lainnya
4		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	2 Org	1.116.104.518	2 Org	1.171.909.744	2 Org	1.230.505.231	2 Org	1.292.030.493	2 Org	4.810.549.986	Provinsi Gorontalo/Lainnya
3		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100%	100%	32.748.269.538	100%	35.210.792.253	100%	37.858.324.297	100%	40.704.757.376	100%	146.522.143.464	Provinsi Gorontalo/Lainnya
1		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	Paket	12 Paket	4.569.874.911	12 Paket	4.912.615.529	12 Paket	5.281.061.694	12 Paket	5.677.141.321	48 Paket	20.440.693.455	Provinsi Gorontalo/Lainnya
2		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	Paket	12 Paket	3.767.131.333	12 Paket	4.049.666.183	12 Paket	4.353.391.147	12 Paket	4.679.895.483	48 Paket	16.850.084.145	Provinsi Gorontalo/Lainnya
3		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	12 Paket	24.411.263.294	12 Paket	26.248.510.541	12 Paket	28.223.871.456	12 Paket	30.347.720.572	48 Paket	109.231.365.863	Provinsi Gorontalo/Lainnya
TOTAL PAGU INDIKATIF POS PIMPINAN SETDA						36.644.150.566		39.175.283.507		41.894.856.288		44.816.932.141		162.531.222.502	Provinsi Gorontalo/Lainnya
TOTAL PAGU INDIKATIF SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO						109.947.607.471		116.374.287.082		123.707.964.481		135.970.427.429		487.340.672.477	

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Sedangkan tujuan dan sasaran adalah tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja SKPD selama lima tahun.

Dalam rangka menjembatani pencapaian Tujuan dan Sasaran RPD 2023-2026, ditetapkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, yang dijabarkan dalam Strategi dan Arah Kebijakan, Program serta Indikasi Kegiatan yang masing-masing memiliki target kinerja yang harus dilaksanakan. Dengan demikian, telah terbangun suatu koridor yang akan memberikan arahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo selama periode 2023-2026.

Untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023-2026, Indikator yang didukung oleh Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut.

TABEL. 7.1
INDIKATOR RPD YANG DIDUKUNG OLEH PERANGKAT DAERAH

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI AWAL PERIODE RPD	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				KONDISI AKHIR PERIODE RPD
		TAHUN 2021	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Kematangan Organisasi	48	48	49	49	50	50 (Sangat Tinggi)
2	Indeks Kerukunan Umat Beragama	68,74	-	-	-	69	69
3	Nilai SAKIP OPD	B	BB	BB	BB	A	A

Untuk mendukung Indikator Kinerja Utama dalam RPD, masing-masing Perangkat Daerah memiliki Indikator Kinerja Utama yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Indikator Kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam mendukung visi

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA
			

dan misi kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci pada akhir masa jabatan.





Untuk keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah pada akhir periode Renstra dapat dievaluasi dari pencapaian indikator kinerja utama perangkat daerah yang ditetapkan pada tabel 7.2 berikut.

TABEL 7.2
INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENDUKUNG INDIKATOR RPD

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	PELAKSANA
		TAHUN 2021	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Fasilitasi Kegiatan Kesra Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Pemerintahan dan Kesra
2	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan LPPD dengan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Produk Hukum Yang ditindaklanjuti (SK, Pergub dan Perda)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Hukum
4	Persentase Produk Hukum (Perda) yang mendapat persetujuan Kementerian Dalam Negeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase Bantuan Hukum yang difasilitasi Pendampingannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Persentase Rekomendasi Bidang Ekonomi Yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan
7	Persentase Rekomendasi Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Yang ditindak lanjuti Dalam Rangka Penyerapan Anggaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA
			

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	PELAKSANA
		TAHUN 2021	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Tingkat Kematangan UKPBJ	8/9 Proaktif	9/9 Proaktif	3/9 Strategis	6/9 Strategis	9/9 Strategis	9/9 Strategis	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
9	Persentase OPD yang mengalami Peningkatan Nilai IRB	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Organisasi
10	Persentase Fasilitasi Pelayanan Umum dan Pimpinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Umum
11	Indeks Budaya Kerja	N/A	Belum Bagus	Belum Bagus	Bagus	Bagus	Bagus	Seluruh Biro Lingkup Setda
12	Indeks Pembangunan Statistik OPD	N/A	2,5	2,6	2,7	2,8	2,8	
13	Predikat Pengawasan Kearsipan OPD	Sangat Kurang	Sangat Kurang	Sangat Kurang	Cukup	Cukup	Cukup	
14	Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	B	B	B	A	A	
15	Persentase Lembaga Bina Mental Spiritual yang ditingkatkan Kapasitas Tata Kelola dan Kualitas Sarana Prasarana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Pemerintahan dan Kesra

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA
			





BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategi (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo 2023-2026 ini merupakan penjabaran secara operasional dari RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo. Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo 2023-2026 merupakan pedoman bagi pemangku jabatan dan aparatur di Lingkungan Sekretariat Daerah dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan sekaligus acuan bagi stakehoders yang memiliki keterkaitan dengan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.

Guna menjaga konsistensi pelaksanaan serta keberlanjutan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah selaku unsur penunjang pelaksanaan pemerintahan daerah maka terdapat kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Strategis yang perlu ditetapkan sebagai berikut:

1. Seluruh pemangku kepentingan dan aparatur di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo berkewajiban untuk melaksanakan program dalam Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 secara murni dan konsekuen;
2. Seluruh pemangku kepentingan dan aparatur di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo berkewajiban menjaga keterkaitan program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan visi, misi dan prioritas pembangunan Provinsi Gorontalo;
3. Seluruh pemangku kepentingan dan aparatur di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo berkewajiban untuk menggunakan sumber daya organisasi secara efektif, efisien dan ekonomis melalui manajemen yang berkualitas.
4. Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Sekretariat Daerah setiap tahunnya dalam periode 2023 s/d 2026
5. Adapun besaran anggaran yang terdapat dalam Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 ini masih bersifat indikatif dan masih dapat berubah kedepannya mengingat masih terdapat beberapa tahapan strategis dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo.
6. Dalam hal pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 kedepannya, apabila terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi pada tahun pelaksanaan dan anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pencapaian indikator kinerja yang ada maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan Rencana Strategis Sekretariat Daerah dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah Renstra ini dibuat untuk menjadi acuan dan landasan Sekretariat Daerah Setda Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi dan kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan. Oleh karenanya mengharapkan masukan dan saran yang membangun untuk penyempurnaan dokumen

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA
			

ini. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen Renstra Sekretariat Daerah Setda Provinsi Gorontalo 2023-2026.

6 Pj. GUBERNUR GORONTALO,



HAMDA HENDRA NOER

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA
f	f		6